

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 285 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Dishub yang selanjutnya disebut Renstra Dishub adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Dishub yang selanjutnya disebut Renja Dishub adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISHUB

Pasal 2

Dokumen Renstra Dishub merupakan dokumen perencanaan strategis Dishub untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dishub yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dishub yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Dishub bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dishub dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dishub dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Dishub agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dishub;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dishub;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dishub.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISHUB

Pasal 4

(1) Renstra Dishub Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Dishub dalam menyusun Renja Dishub.

(2) Renstra Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dishub paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Dishub; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Dishub.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Dishub Tahun 2025-2029;
   2. strategi Dishub dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Dishub dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Dishub; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISHUB

Pasal 5

(1) Dishub melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dishub dan evaluasi hasil Renstra Dishub sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Dishub terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dishub.
(3) Kepala Dishub menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Dishub.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISHUB

Pasal 6

Perubahan Renstra Dishub dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Dishub mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Dishub dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Dishub, maka Renstra Dishub dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Dishub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Dishub Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Dishub terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Dishub.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 285

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 285 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasar amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral, dalam hal ini sektor perhubungan, yang harus disusun oleh Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, secara substansi, Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 atau yang merupakan periode pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045. Tujuan RPJMN Tahap 1, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, bertujuan memperkuat fondasi transformasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Fokusnya pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif.

Pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2025 - 2029 disebutkan bahwa tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini masih terkait konektivitas dan *bottlenecking*. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transpoftasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi sefta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Perangkat Daerah harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna sefta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan dan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2025 – 2029. Dokumen Renstra Dishub Kab. Bandung Tahun 2025 – 2030 disusun untuk periode 5 (lima) tahun tahapan program kegiatan dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 – bukan dimulai dari Tahun 2025. Judul dokumen menunjukkan bahwa periode Renstra dimulai dari Tahun 2025, dikarenakan jabatan Bupati Bandung periode sebelumnya berakhir di Bulan Februari Tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Pendekatan program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan capaian kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Walaupun memang, untuk urusan perhubungan sudah tidak terikat lagi dengan SPM, dikarenakan UU No. 23 Tahun 2014 mengkategorikan urusan perhubungan sebagai urusan wajib yang tidak

berkaitan dengan ‘Pelayanan Dasar’, sementara SPM adalah ketentuan mengenai standar minimal mutu ‘Pelayanan Dasar’ yang berhak diperoleh warga.

Kerangka pengeluaran jangka menengah menekankan pengambilan keputusan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengarahkan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif yang disusun dalam Renstra merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif dimaksud digunakan untuk penyusunan Renja.

Adapun keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD adalah bahwa, kebijakan umum dalam RPJMD dijadikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perumusan Renstra merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RPJMD dimana salah satu tahapannya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Selain terkait dengan RPJMD, RKPD, dan Renja sebagaimana diuraikan di atas, Renstra pun memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, yang mana bahwa dalam merumuskan Renstra harus mencakup di antaranya:

1. Review Renstra Kementerian/Lembaga (dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
2. Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi (dalam hal ini Dishub Prov. Jabar);
3. Penelaahan RTRW Kabupaten Bandung;

4. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Dishub Kab. Bandung mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentangPedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
16. PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah Kabupaten Bandung.
19. Surat Edaran Nomor 000.8/042/398/Bapperida Tanggal 6 Februari 2025 tentang agenda penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

Adapun *output outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan, merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
10. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
11. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
12. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
13. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
14. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.
15. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.
16. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
17. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
19. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.
20. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
21. PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.

22. PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
23. PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
25. PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
26. PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
27. PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
28. PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
29. PERDA Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
30. PERBUP Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah Kabupaten Bandung.
31. PERBUP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
32. PERBUP Nomor 71 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah untuk menyediakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas selama periode waktu tertentu (biasanya 5 tahun). Renstra ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan.

I.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dishub Kab. Bandung Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 dapat:

1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode Renstra Tahun 2021 – 2026.
2. Selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah urusan perhubungan.
3. Selaras dengan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat.
4. Merespon isu-isu strategis terkait urusan perhubungan.
5. Mengakomodir usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat.

I.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Renstra Dishub Kab. Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah untuk:

1. Menjadi panduan dan pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sejalan dengan perencanaan sebelumnya.
2. Memecahkan masalah bidang perhubungan yang dihadapi; serta
3. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishub Kab. Bandung.
4. Menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 disusun dengan Sistematika Penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan paling sedikit memuat

1 Latar Belakang

2 Landasan Hukum Penyusunan

3 Maksud dan Tujuan

4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Perhubungan paling sedikit memuat

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
2. Permasalahan dan Isu strategis Dinas Perhubungan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan paling sedikit memuat

1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan 2025 – 2029
2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan 2025 – 2029
3 Strategis Dinas Perhubungan 2025 – 2029
4 Arah dan Kebiajakn Dinas Perhubungan 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan paling sedikit memuat

1. Uraian Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
2. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029 IKU
3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

Bab 5 Penutup paling sedikit memuat

1. Kesimpulan
2. Kaidah Pelaksanaan
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dishub Kab. Bandung merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

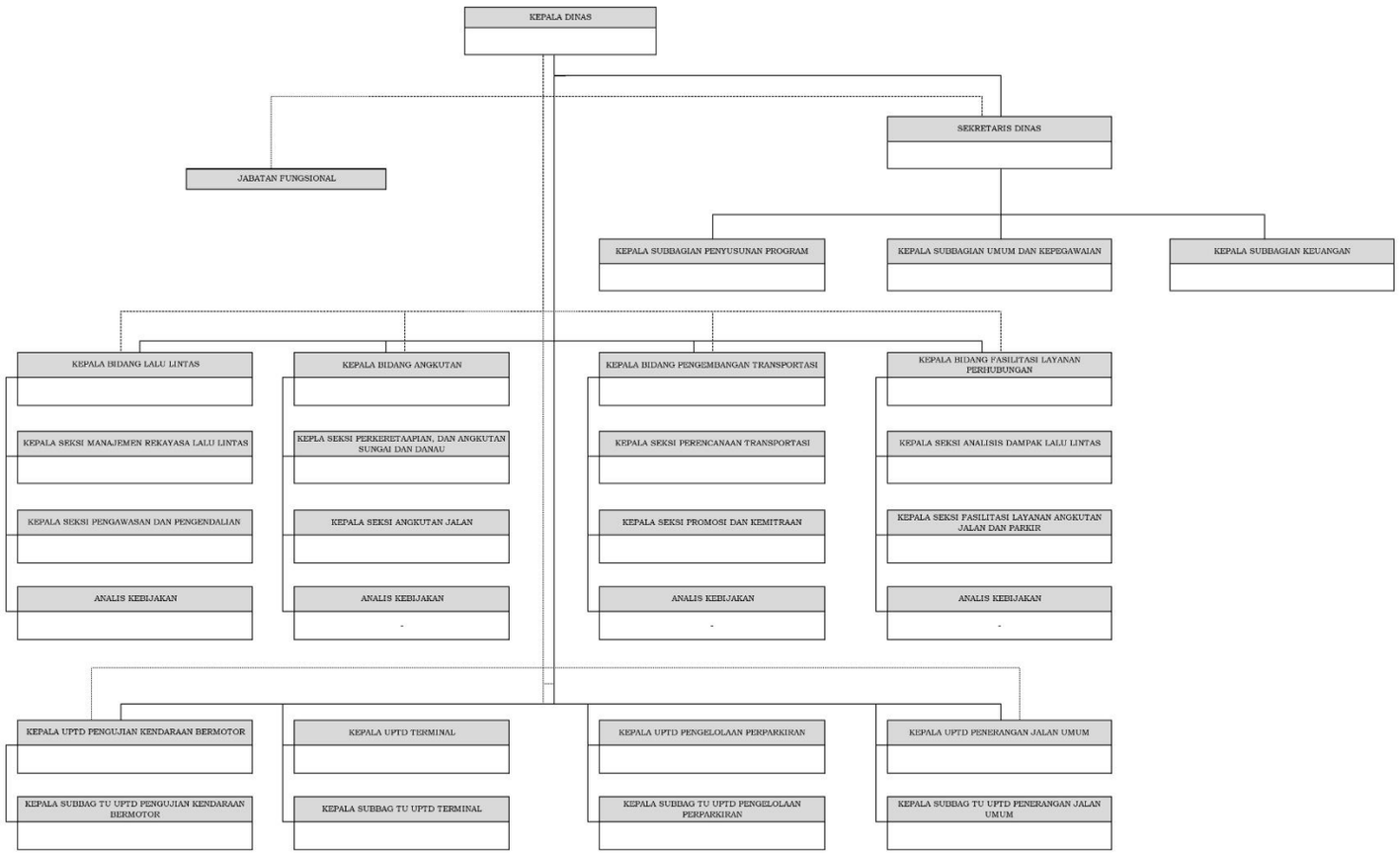
Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merekam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Selanjutnya, tugas dan fungsi pada Dishub Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Tugas Pokok Dishub adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Dishub Kabupaten Bandung menjalankan fungsi sebagai berikut:

Gambar 2.1 :
Bagan Struktur Organisasi Dishub Kab. Bandung



Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2025.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Sub tugas setiap struktur yang terdapat di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan

   Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Kabupaten Bandung.

   Dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Bandung;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Bandung;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai sub tugas:

   a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Fasilitasi Layanan Perhubungan, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;
   b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
   c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
e. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
f. mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
g. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapatrapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
i. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
j. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
l. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas melaksanakan program:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
c. Program pengelolaan pelayaran;
d. Program pengelolaan perkeretaapian; dan

Kepala Dinas Perhubungan, membawahkan:

a. Sekretariat;
b. Bidang Lalu Lintas;
c. Bidang Angkutan;
d. Bidang Pengembangan Transportasi;
e. Bidang Fasilitasi Layanan Perhubungan;
f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. UPTD Pengelolaan Terminal;

h. UPTD Pengelolaan Perparkiran;
i. UPTD Penerangan Jalan Umum; dan
j. Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dishub Kabupaten Bandung

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di Dishub Kab. Bandung adalah seperti tergambar pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Jumlah Pegawai Dishub Kab. Bandung

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	STRUKTURAL	25	21	4
2	JAFUNG MUDA	1	1	
3	FUNGSIONAL PKB PENYELIA	6	6	
4	FUNGSIONAL PKB MAHIR	2	2	
5	FUNGSIONAL PKB TERAMPIL	8	7	1
6	FUNGSIONAL PKB PEMULA	5	5	
7	FUNGSIONAL ARSIPARIS MAHIR	1		1
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	1	
9	FUNGSIONAL UMUM	116	95	21
10	Non PNS	382	354	28
JUMLAH		547	492	55

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

Dari Tabel 2.1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak (547 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya mencapai 30,16% (165 orang), sisanya sebanyak 69,84% merupakan pegawai Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, *output* serta *outcome* kegiatan.

Adapun komposisi pegawai PNS Dinas Perhubungan berdasarkan jenis kelamin, Laki laki sebanyak 138 (83,6%) pegawai. Sementara untuk pegawai perempuan sebanyak 27 (16,4%) pegawai.

Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-ABK) Dishub Kab. Bandung Bulan Januari 2025, terpetakan bahwa Dishub Kab. Bandung perlu dikelola oleh 55 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 537 orang. Terhitung pada Tanggal 1 Agustus 2025, jumlah ASN yang ada adalah 165 orang (kurang 372 orang dari kebutuhan).

Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sebagai sarana prasarana, di antaranya:

1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya sangat signifikan dan cukup tertata baik selama periode Renstra sebelumnya. Namun pun demikian, pemenuhan standar ruang kerja masih perlu ditingkatkan melalui Renstra ini. Berdasar pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja di Tahun 2025-2029. Gedung bangunan yang dimiliki oleh Dishub terdiri dari Gedung Sekretariat seluas 591 m^2, Gedung Bidang Fasilitasi Layanan Perhubungan seluas 181,51 m^2, Gedung Bidang Angkutan, Bidang Pengembangan Transportasi, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Soreang seluas 931 m^2, Gedung Bidang Lalu Lintas dan UPTD Penerangan Jalan Umum seluas 168,91 m^2, Gedung UPTD Terminal seluas 127,21 m^2, Gedung UPTD Perparkiran seluas 66,89 m^2, Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Baleendah seluas 416,05 m^2, Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Cicalengka seluas 125,17 m^2, Gedung UPTD Posko Induk Nagreg seluas 332,15 m^2, Gedung UPTD Terminal Cicalengka seluas 418,18 m^2, Gedung UPTD Terminal Soreang seluas 68 m^2, Gedung UPTD Terminal Ciwidey seluas 160,29 m^2, serta Gedung UPTD Terminal Pangalengan seluas 95,19 m^2.
2. Kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). Total jumlah kendaraan kendaraan operasional dinas yang dimiliki

adalah sebanyak 52 kendaraan yang terdiri dari 24 Unit kendaraan roda dua, 20 Unit kendaraan roda empat, dan 8 Unit kendaraan roda enam.

3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki Dishub Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) unit layanan. Dari keenam unit layanan tersebut, 2 (dua) unit layanan berupa pelayanan statis di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan di kantor UPT PKB Baleendah. Selebihnya 4 (empat) unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di titik layanan Cicalengka, Margaasih, Majalaya, dan di mall pelayanan publik, serta untuk pelayanan PKB jemput bola di daerah.
4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu, serta untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.

   Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

   a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
   b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
   c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

   Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam pengelolaan Terminal Tipe C saja. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan bahwa jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9

(sembilan). Secara *de facto*, ke-9 terminal tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan, tetapi juga melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Data Dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan Perhubungan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Pertama, pada aspek penyelenggaraan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah memfasilitasi dan mengelola sebanyak 52 trayek angkutan perkotaan dan trayek perintis yang beroperasi dengan frekuensi tinggi (lebih dari 5 kali dalam seminggu). Keberadaan trayek tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan maupun antar-kecamatan. Kedua, pada aspek lalu lintas, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan pengukuran tingkat pelayanan jalan melalui indikator V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio). Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata V/C Ratio sebesar 0,61 dengan tingkat pelayanan C, yang berarti arus lalu lintas relatif masih stabil. Namun demikian, terdapat sejumlah ruas jalan yang telah mendekati kapasitas maksimum, antara lain Jalan Raya Soreang–Kopo dengan nilai V/C Ratio sebesar 0,88 (kategori E), serta Jalan Raya Moh. Toha di Kecamatan Dayeuhkolot dengan nilai V/C Ratio sebesar 0,84 (kategori D). Kondisi ini menuntut adanya langkah lanjutan berupa penerapan manajemen lalu lintas yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya kemacetan parah di masa mendatang.

2.1.3.2 Capaian Pelaksanaan IKU Dan IKK Tahun 2020-2024

Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hampir semua indikator kinerja telah memenuhi target bahkan ada capaiannya melebihi target.

Berikut Adalah hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-							REALISASI CAPAIAN CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	2,16	2,25	4,58	5,33	6,08	6,83	7,58	3,18	3,83	4,98	5,71	5,73	147,22%	170,22%	108,73%	107,13%	94,24%
2	Rasio Konektivitas Kabupaten	n/a	n/a	46,94	47,24	47,54	47,84	48,14	n/a	n/a	49,52	49,52	49,52	n/a	n/a	105,50%	104,83%	104,16%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

2.1.3.3 Hasil Evaluasi Capaian Dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Dishub Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Pencapaian kinerja pelayanan Dishub Kab. Bandung beserta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya (2021 – 2026) adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan 2.5. Pencapaian atas indikator kinerja yang ditampilkan adalah terkait pentahapan program, kegiatan dan Subkegiatan di Tahun 2021 s.d. 2025.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishub Kab. Bandung Berdasarkan Renstra 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-							REALISASI CAPAIAN CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP				74,00	76,00	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	76,89	76,93	77,50	79,60	81,75	103,91%	101,22%	100,00%	102,05%	104,14%
2	Nilai IKM				77,00	78,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	72,81	77,97	77,19	78,43	79,86	94,56%	99,96%	102,92%	103,20%	103,71%
3	Persentase BMD dalam kondisi baik				n/a	n/a	100	100	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a	98,80	99,35	99,08	n/a	n/a	98,80%	99,35%	99,08%
4	Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung				2,16	2,25	4,58	5,33	6,08	6,83	7,58	3,18	3,83	4,98	5,71	5,73	147,22%	170,22%	108,73%	107,13%	94,24%
5	Rasio Konektivitas Kabupaten				n/a	n/a	46,94	47,24	47,54	47,84	48,14	n/a	n/a	49,52	49,52	49,52	n/a	n/a	105,50%	104,83%	104,16%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Dishub Kabupaten Bandung periode 2022-2024. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2022 4 indikator telah melebihi target dan satu indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator Persentase BMD dalam Kondisi Baik.

Jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada gap atau kesenjangan yang siginifikan capaian pelayanan pada Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024. Namun pada tahun 2024 untuk indikator Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung tidak mencapai target akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 indikator ini mengalami kenaikan capaian. Swcara keseluruhan capaian realisasi telah mencapai target yang telah ditargetkan.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pelayanan Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan internal.

a. Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Dishub Tahun 2022-2024 diantaranya yaitu:
b. Komitmen dan sinergitas antar bidang di Dishub Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
c. keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Bandung;
d. semua proses perencanaan target kinerja sudah sesuai dengan alur aturan yang berlaku dan tepat waktu; dan
e. pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan secara optimal.

Adapun faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Dishub Kabupaten Bandung yaitu:

a. sinergitas antara Dishub dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan; dan
b. adanya aplikasi SIPD-RI sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi. Walaupun capaian kinerja pelayanan Dishub sudah baik namun selama rentang tahun 2021-2026 terdapat kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut.

Beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian kinerja Dishub Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sering terjadi *error* atau *bug system* sehingga menghambat penginputan RKPD/Renja ke aplikasi;
b. Sering dilakukannnya Pemutakhiran Kepmen oleh Kemendagri sehingga banyak subkegiatan yang hilang atau berubah Indikator dari RPJMD;
c. sumber daya aparatur khususnya perencana yang masih terbatas dan belum tersebar secara merata.

Jika dilihat dari analisis capaian kinerja Dishub tahun 2020-2024 di atas maka dapat dilihat bahwa Dishub memiliki potensi yang baik untuk melaksanakan kinerja pada periode selanjutnya. Hal ini berdasarkan rerata nilai capaian untuk setiap indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mamadai.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kab. Bandung Periode Renstra 2021 – 2025

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	38.347.340.575	41.947.858.215	42.800.018.900	80.963.830.923	47.646.037.290	36.373.600.821	39.739.429.445	40.210.280.739	76.258.508.999	20.107.430.008	94,85 %	94,74 %	93,95 %	94,19 %	42,20%
2	15	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.674.545	77.686.000	73.261.000	137.966.395	108.555.650	168.873.356	77.676.022	73.148.701	136.737.114	57.960.300	95,58 %	99,99 %	99,85 %	99,11 %	53,39%
2	15	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.436.172	57.000.000,00	41.635.000	91.803.000	78.099.700	151.763.756	56.992.722,00	41.581.501	90.824.314	57.960.300	95,19 %	99,99 %	99,87 %	98,93 %	74,21%
2	15	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.238.373	20.686.000,00	31.626.000	46.163.395	20.455.950	17.109.600	20.683.300,00	31.567.200	45.912.800		99,25 %	99,99 %	99,81 %	99,46 %	0,00 %
2	15	1	2	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	1	2	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
2	15	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.041.845.540	25.002.289.560	24.673.633.452	25.652.082.978	25.940.075.893	21.416.448.550	23.062.731.661	22.353.229.145	24.357.608.809	10.175.309.994	92,95 %	92,24 %	90,60 %	94,95 %	39,23%
2	15	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.041.845.540	25.002.289.560,00	24.673.633.452	25.652.082.978	25.940.075.893	21.416.448.550	23.062.731.661,00	22.353.229.145	24.357.608.809	10.175.309.994	92,95 %	92,24 %	90,60 %	94,95 %	39,23%
2	15	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	262.468.835	0	0	540.000.000	329.248.000	237.960.411	0	0	438.588.000		90,66 %	0	0	81,22 %	0,00 %
2	15	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	262.468.835	0	0	0	0	237.960.411	0	0	0		90,66 %	0	0	0	
2	15	1	2	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	540.000.000	329.248.000	0	0	0	438.588.000		0	0	0	81,22 %	0,00 %
2	15	1	2	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	58.385.000	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0	1,34 %
2	15	1	2	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	58.385.000	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0	1,34 %
				3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	1	2,1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.033.650	309.250.000	555.056.020	559.892.500	345.214.931	160.883.500	307.394.668	552.124.450	556.279.526	2.000.000	95,74%	99,40%	99,47%	99,35%	0,58%
2	15	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.250.000,00	261.150.000,00	379.175.000	172.790.000	189.600.000	56.100.000,00	259.294.668,00	378.509.250	172.360.000		99,73%	99,29%	99,82%	99,75%	0,00%
2	15	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.783.650,00	48.100.000,00	175.881.020	387.102.500	155.614.931	104.783.500,00	48.100.000,00	173.615.200	383.919.526	2.000.000	93,74%	100,00%	98,71%	99,18%	1,29%
2	15	1	2,1	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndanga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	1	2,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	1	2,1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.160.540.360	1.208.237.155	1.556.942.048	987.535.958	899.531.161	1.146.704.723	1.173.803.341	1.508.929.143	971.425.035	308.652.000	98,81%	97,15%	96,92%	98,37%	34,31%
2	15	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	0	13.885.000	20.000.000	20.000.000,00	39.656.651,00	0	13.885.000	19.847.000	0	99,14%	0	100,00%	99,24%	0,00%
2	15	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.836.347,00	389.196.655,00	927.490.918	357.865.088	376.673.561,01	422.350.880,00	385.846.800,00	902.443.450	355.955.500	36.637.000	99,18%	99,14%	97,30%	99,47%	9,73%
2	15	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	492.072.413,00	532.257.000,00	371.712.130	355.922.870	431.327.100	482.338.482,00	530.208.891,00	365.530.730	351.937.900	235.940.000	98,02%	99,62%	98,34%	98,88%	54,70%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	18.971.750,00	10.000.000,00	0	0	0	18.969.000,00	9.432.500,00	0	0	0	99,99%	94,33%	0	0	0
2	15	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.659.850,00	276.783.500,00	243.854.000	253.748.000	71.530.500	183.389.710,00	248.315.150,00	227.069.963	243.684.635	36.075.000	99,85%	89,71%	93,12%	96,03%	50,43%
2	15	1	2,1	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.106.000	57.000.000	44.175.000	1.389.878.714	4.866.994.550	129.877.000	56.610.000	44.169.000	1.353.110.000	4.464.500.000	98,31%	99,32%	99,99%	97,35%	91,73%
2	15	1	2,1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	1.319.515.914	4.714.400.000	0	0	0	1.282.850.000	4.464.500.000	0	0	0	97,22%	94,70%
2	15	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	132.106.000,00	57.000.000,00	44.175.000	70.362.800	152.594.550	129.877.000,00	56.610.000,00	44.169.000	70.260.000		98,31%	99,32%	99,99%	99,85%	0,00%
2	15	1	2,1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.672.480.000	14.202.035.500	14.441.226.780	49.938.059.500	13.553.250.681	12.419.629.684	13.986.982.888	14.242.515.360	46.809.521.897	4.890.816.414	98,00%	98,49%	98,62%	93,74%	36,09%
2	15	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	251.555.500,00	341.547.980	35.885.149.000	1.085.458.633,19	0	219.111.529,00	241.470.760	32.906.096.015	156.861.240	0	87,10%	70,70%	91,70%	14,45%
2	15	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.672.480.000,00	13.950.480.000,00	14.099.678.800	14.052.910.500	12.467.792.048	12.419.629.684,00	13.767.871.359,00	14.001.044.600	13.903.425.882	4.733.955.174	98,00%	98,69%	99,30%	98,94%	37,97%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	1	2,1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.191.645	1.091.360.000	1.455.724.600	1.502.415.054	1.288.781.600	693.223.597	1.074.230.865	1.436.164.940	1.441.580.780	133.631.300	94,55%	98,43%	98,66%	95,95%	10,37%
2	15	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.240.145,00	501.960.000,00	479.290.000	543.404.086	481.960.000	467.609.715,00	487.579.062,00	461.457.844	496.506.350	102.456.300	92,37%	97,14%	96,28%	91,37%	21,26%
2	15	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.087.500,00	94.400.000,00	63.110.000	101.620.000	94.400.000	82.087.400,00	94.399.770,00	62.960.000	101.512.380	31.175.000	100,00%	100,00%	99,76%	99,89%	33,02%
2	15	1	2,1	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.864.000,00	495.000.000,00	913.324.600	857.390.968	712.421.600	143.526.482,00	492.252.033,00	911.747.096	843.562.050	0	99,08%	99,44%	99,83%	98,39%	0,00%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	1	2,1	0	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	255.999.824	255.999.824	0	0	0	193.657.838	73.780.000	0	0	0	75,65%	28,82%
2	15	1	2,1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	255.999.824	255.999.824	0	0	0	193.657.838	73.780.000	0	0	0	75,65%	28,82%
2	15	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.609.542.049	8.991.880.045	25.283.115.944	28.076.326.662	78.135.204.674	8.247.411.643	8.272.546.850	22.375.924.519	27.480.003.158	15.535.403.091	95,79%	92,00%	88,50%	97,88%	19,88%
2	15	2	2	0	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	46.831.534	75.613.700	0	299.645.500	722.813.000	46.778.880	75.133.700	0	287.509.665	0	99,89%	99,37%	0	95,95%	0,00%
2	15	2	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	0	521.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	15	2	2	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	46.831.534,00	75.613.700,00	0	0	0	46.778.880,00	75.133.700,00	0	0	0	99,89%	99,37%	0	0	0
2	15	2	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2	7	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	299.645.500	201.503.000	0	0	0	287.509.665	0	0	0	0	95,95 %	0,00 %
2	15	2	2	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.063.396.090	1.405.335.000	20.966.086.911	23.308.930.493	63.886.211.500	2.043.387.710	1.391.245.686	18.142.302.380	22.822.408.477	14.131.375.271	99,03 %	99,00 %	86,53 %	97,91 %	22,12%
2	15	2	2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	687.702.200,00	552.000.000,00	190.995.400	185.878.533	209.644.000	680.997.410,00	547.804.475,00	176.774.089	185.122.304	1.300.000	99,03 %	99,24 %	92,55 %	99,59 %	0,62 %
2	15	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.339.069.427,00	816.711.000,00	20.740.467.511	23.050.933.948	20.601.435.500	1.325.927.500,00	807.740.461,00	17.931.158.291	22.565.571.173	628.709.100	99,02 %	98,90 %	86,45 %	97,89 %	3,05 %
2	15	2	2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	36.624.463,00	36.624.000,00	34.624.000	72.118.012	30.082.000	36.462.800,00	35.700.750,00	34.370.000	71.715.000	0	99,56 %	97,48 %	99,27 %	99,44 %	0,00 %
2	15	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0	0	0	00	43.045.050.000	0	0	0	0	13.501.366.171	0	0	0	0	31,37%
2	15	2	2	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.944.876.508	780.216.000	211.177.085	756.777.450	583.647.500	1.924.711.005	778.489.737	210.089.494	713.898.186	33.720.000	98,96 %	99,78 %	99,48 %	94,33 %	5,78 %
2	15	2	2	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1.944.876.508,00	0	5.965.005	0	0	1.924.711.005,00	0	5.244.800	0	0	98,96 %	0	87,93 %	0	0
2	15	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0	780.216.000,00	205.212.080	0	0	0	778.489.737,00	204.844.694	0	0	0	99,78 %	99,82 %	0	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2	6	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0	137.675.000	1.737.500	0	0	0	137.675.000	720.000	0	0	0	100,00%	41,44%
2	15	2	2	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0	0	0	619.102.450	581.910.000	0	0	0	576.223.186	33.000.000	0	0	0	93,07%	5,67%
2	15	2	2	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0	0	13.540.000	17.224.600	3.080.000	0	0	13.491.000	17.224.000	0	0	0	99,64%	100,00%	0,00%
2	15	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	3.540.000	5.324.600	1.600.000	0	0	3.496.000	5.324.000	0	0	0	98,76%	99,99%	0,00%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	10.000.000	11.900.000	1.480.000	0	0	9.995.000	11.900.000	0	0	0	99,95 %	100,00 %	0,00 %
2	15	2	2,1	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.304.849.200	1.137.564.000	1.166.735.500	896.375.020	739.952.374	1.302.220.700	1.136.221.200	1.163.550.890	887.067.176	172.053.650	99,80 %	99,88 %	99,73 %	98,96 %	23,25%
2	15	2	2,1	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.244.534.200,00	0	0	0	0	1.242.133.300,00	0	0	0	0	99,81 %	0	0	0	0
2	15	2	2,1	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	2.740.000	4.784.400	0	0	0	2.740.000	4.080.000	0	0	0	100,00 %	85,28 %	0
2	15	2	2,1	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	775.000.000,00	867.675.500	512.382.800	445.968.374	0	774.642.000,00	866.064.000	507.123.800	169.753.650	0	99,95 %	99,81 %	98,97 %	38,06%
2	15	2	2,1	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	0	0	3.110.200	0	0	0	0	3.110.000	0	0	0	0	99,99 %	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2,1	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	294.334.000,00	283.700.000	302.058.900	284.334.000	0	293.349.300,00	282.126.890	299.734.976	2.300.000	0	99,67%	99,45%	99,23%	0,81%
2	15	2	2,1	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.315.000,00	0	0	0	4.800.000	35.087.400,00	0	0	0	0	99,36%	0	0	0	0,00%
2	15	2	2,1	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	68.230.000,00	12.620.000	74.038.720	4.850.000	25.000.000,00	68.229.900,00	12.620.000	73.018.400	0	100,00%	100,00%	100,00%	98,62%	0,00%
2	15	2	2,1	0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	892.785.500	1.597.987.000	1.929.671.358	2.357.917.986	5.494.153.500	890.889.550	1.585.407.705	1.887.755.375	2.319.990.600	994.211.670	99,79%	99,21%	97,83%	98,39%	18,10%
2	15	2	2,1	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	123.410.240,00	238.410.000,00	122.640.000	0	0	121.800.000,00	236.965.000,00	115.030.000	0	0	98,70%	99,39%	93,79%	0	0
2	15	2	2,1	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	0	244.383.000,00	21.047.850	0	0	0	234.317.905,00	20.897.300	0	0	0	95,88%	99,28%	0	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
					Kabupaten/Kota															
2	15	2	2,1	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	753.775.260,00	1.099.594.000,00	1.232.688.000	1.200.704.000	977.957.550	753.489.550,00	1.098.524.800,00	1.231.497.010	1.200.618.800	732.428.470	99,96%	99,90%	99,90%	99,99%	74,89%
2	15	2	2,1	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000	0	0	15.600.000,00	15.600.000,00	15.575.000	0	0	100,00%	100,00%	99,84%	0	0
2	15	2	2,1	14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	56.248.000	133.524.000	0	0	0	56.248.000	47.283.200	0	0	0	100,00%	35,41%
2	15	2	2,1	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	7.800.000	3.900.000	0	0	0	100,00%	50,00%
2	15	2	2,1	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	537.695.508	983.165.986	4.369.946.950	0	0	504.756.065	945.323.800	210.600.000	0	0	93,87%	96,15%	4,82%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2,1	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	110.000.000	4.925.000	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.985.000	33.590.000	42.754.690	68.970.000	20.485.100	3.985.000	33.455.000	41.200.000	68.970.000	0	100,00%	99,60%	96,36%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3.250.000,00	21.860.000,00	27.250.290	21.200.000	19.820.100	3.250.000,00	21.815.000,00	25.715.000	21.200.000	0	100,00%	99,79%	94,37%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	735.000,00	11.730.000,00	15.504.400	47.770.000	665.000	735.000,00	11.640.000,00	15.485.000	47.770.000	0	100,00%	99,23%	99,87%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	2	2,1	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	490.128.950	225.876.845	75.962.000	137.352.000	279.527.500	489.862.500	225.829.800	75.962.000	137.346.000	0	99,95%	99,98%	100,00%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	243.302.500,00	0	0	0	0	243.190.000,00	0	0	0	0	99,95%	0	0	0	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2,1	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	246.826.450,00	225.876.845,00	75.962.000	137.352.000	279.527.500	246.672.500,00	225.829.800,00	75.962.000	137.346.000		99,94%	99,98%	100,00%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	2	2,1	8	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	2	2,1	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	719.562.500	3.539.397.500	661.770.000	226.483.613	6.387.134.200	694.678.599	2.850.464.022	626.343.780	218.939.054	204.042.500	96,54%	80,54%	94,65%	96,67%	3,19%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2,1	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	685.501.500,00	3.509.256.500	659.650.000	0	00	660.617.799,00	2.820.778.222,00	624.223.780	0	0	96,37 %	80,38 %	94,63 %	0	0
2	15	2	2,1	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	34.061.000,00	30.141.000,00	2.120.000	11.304.613	120.000	34.060.800,00	29.685.800,00	2.120.000	11.304.600	0	100,00 %	98,49 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
2	15	2	2,1	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	215.179.000	6.387.014.200	0	0	0	207.634.454	204.042.500	0	0	0	96,49 %	3,19 %
2	15	2	2,1	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.143.126.767	196.300.000	0	0	0	850.897.699	196.300.000	0	0	0	74,44 %	100,00 %	0	0	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
2	15	2	2,1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	964.738.117,00	196.300.000,00	0	0	0	672.509.699,00	196.300.000,00	0	0	0	69,71%	100,00%	0	0	0
2	15	2	2,1	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.388.650,00		0	0	0	178.388.000,00	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0
2	15	2	2,1	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 -	0 -	18.418.400	6.650.000	18.200.000	0	0	18.229.600	6.650.000	0	0	0	98,97%	100,00%	0,00%
2	15	2	2,1	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	0	0	18.418.400	6.650.000	18.200.000	0	0	18.229.600	6.650.000	0	0	0	98,97%	100,00%	0,00%

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
2	15	2	3,2	0	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	2	3,2	1	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	2	3,2	2	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	0	0	197.000.000	0	0	0	0	197.000.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	0	0	197.000.000	0	0	0	0	197.000.000	0	0	0	0	100,00%	00	0

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
					Kabupaten/Kota															
2	15	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	17.974.500	17.974.000	91.080.600	101.217.800	93.560.000	17.974.400	17.750.000	89.554.000	100.420.000	0	100,00 %	98,75 %	98,32 %	99,21 %	0,00 %
2	15	3	2	0	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	17.974.500	17.974.000	91.080.600	101.217.800	93.560.000	17.974.400	17.750.000	89.554.000	100.420.000	0	100,00 %	98,75 %	98,32 %	99,21 %	0,00 %
2	15	3	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	17.974.500,00	17.974.000,00	91.080.600	101.217.800	93.560.000	17.974.400,00	17.750.000,00	89.554.000	100.420.000	0	100,00 %	98,75 %	98,32 %	99,21 %	0,00 %

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Angaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw 1)	2021	2022	2023	2024	2025
					secara Elektronik															
2	15	5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0	438.650.540	304.344.000	311.809.600	533.746.240	0	378.047.700	304.344.000	308.834.600	113.410.512	0	86,18%	100,00%	99,05%	21,25%
2	15	5	2	0	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	0	438.650.540	304.344.000	311.809.600	533.746.240	0	378.047.700	304.344.000	308.834.600	113.410.512	0	86,18%	100,00%	99,05%	21,25%
2	15	5	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	0	201.726.000,00	0	0	533.746.240	0	199.983.200,00	0	0	113.410.512	0	99,14%	0	0	21,25%
2	15	5	2	3	Pengendalian PelaksanaaRencana Induk Perkeretaapian	0	236.924.540,00	304.344.000	311.809.600	0	0	178.064.500,00	304.344.000	308.834.600	0	0	75,16%	100,00%	99,05%	0
Jumlah Total						46.974.857.124	51.396.362.800	68.478.559.444	109.453.184.985	126.408.548.204	44.638.986.864	48.407.773.995	62.980.103.258	104.147.766.757	35.756.243.611	95,03%	94,19%	91,97%	95,15%	28,29%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Periode 2021-2025

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM BMD dalam Kondisi Baik	76 Point 78 Point	75.50 Point 75 Point 100 %	78 Point 76Point 100 %	78,5 Point 77 Point 100 %	81.75 Point 78 Point 100%	76,93 Point 77,97 Point	77.50 Point 77,19 Point 99.80%	79.60 Point 78,43 Point 99.35 %	81.75 Point 79.86 Point 99.08 %		101,22 % 99.96 %	100 % 102.92 % 99.80 %	102.05 % 103.20 % 99.35 %	104.14 % 103.71 % 99.08 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	2 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	5 Dokumen	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen		0	0	100 %	100 %	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kinerja Yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	3 Laporan	3 Laporan		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	12 Dokumen	0	0	0	0		0	0	0	0	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	12 Data	0	0	0	0		0	0	0	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	12 Bulan	100%	0	0	0	12 Bulan	100%	0	00		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	148 Orang/Bulan	148 Orang/bulan	148 Orang/bulan	0	0	148 Orang/Bulan	148 Orang/bulan		0	0	100 %	100 %	
Administrasi Barang Milik Daerah pada																

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Perangkat Daerah																
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0	0	0		100 %	0	0	0	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen		0	0	0	100 %	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi	0	0	0	0	100%	0	0	0	0		0	0	0	0	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0		0	0	0	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	100%	100%	80%	80%	80%	100%	100%	80%	80%		100 %	100%	80%	80%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	2 Jenis	100%	0	0	0	2 Jenis	100%	0	0		100 %	100%			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	450 Paket	187 Paket	50 Paket	0	0	450 Paket	187 Paket		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal	27 Orang	100%	0	0	0	27 Orang	100%	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	148 Orang	148 Orang	0	0	0	148 Orang		0	0	0	100 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Jenis	0	11 paket	15 Paket	15 Paket	19 Jenis	0	11 paket	15 Paket		100 %	0	100 %	100 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Jenis	5 Jenis	0	0	0	10 Jenis	5 Jenis	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	15 Paket	15 Paket	15 Paket	0	0	15 Paket	15 Paket		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	6 Jenis	6 Jenis	0	0	0	6 Jenis	6 Jenis	0	0		100 %	100%	0	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	6 Paket	6 Paket	6 Paket	0	0	6 Paket	6 Paket		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bacaan	0	0	0	12 Bulan	12 Bacaan	0	0		100 %	100%	0	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	38 HOK	24 kegiatan	0	0	0	38 HOK	24 kegiatan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	50 Laporan	75 Laporan	90 Laporan	0	0	50 Laporan	75 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1 unit	4 Unit	0	0	0	1 unit		0	0	0	100 %	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	3 Jenis	3 Jenis	0	00		3 Jenis	3 Jenis	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	15 Unit	2 Unit	2 Unit	0	0	15 Unit	2 Unit		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%		0	100%	100 %	100 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0	0		0	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0	12 Laporan	12 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji non ASN, Gaji Outsourching Tenaga Keamanan dan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12 Bulan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0	12 Laporan	12 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	100%	69%	0	0	0	100%	69%	0	0		100 %	100%	0	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pemerintahan Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	0	0	100%	100%	100%	0	0	100%	0		0	0	100 %	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	41 Kendaraan	41 Kendaraan	0	0	0	41 Kendaraan	41 Kendaraan	00	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	41 Unit	41 Unit	0	0	0	41 Unit	41 Unit		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	33 Unit	0	0	0	0		0	0	0	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	6 Jenis	5 Jenis	0	0	0	6 Jenis	5 Jenis	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	5 Unit	5 Unit		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	138 m2	138 m2	0	0	0	138 m2	138 m2	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1 Unit	2 Unit	2 Unit	0	0	1 Unit	2 Unit		0	0	100 %	100 %	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	0	0	0	100%	100%	0	0	0	100%		0	0	0	100 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0	0	0	2 Orang/Bulan		0	0	0	100 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	0	36,50%	40%	0	0	0	36,50%	40%	0		0	100%	100 %	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	0	100%	75%	0	85%	0	100%	75%	0		0	100%	100 %	0	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0		0	0	0	0	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan dan disosialisasikan	4 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	3 Dokumen	0	0		100 %	100%	0	0	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	3 Laporan	0	0	0	0	3 Laporan	0		0	0	100 %	0	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk LLAJ Kabupaten/kota	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan		0	0	0	100 %	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	0	7,20%	0	0	0	0	7,20%	0	0		0	100%	0	00	
	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	0	0	9,70%	12%	0	0	0	9,70%	12%		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpasang / terbangun di jalan dan di luar badan jalan (fasilitas parkir on street dan off street, halte, shelter dll)	112 Buah	738 Perlengkapan Jalan	0	0	0	112 Buah	738 Perlengkapan Jalan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	438 Unit	438 Unit	538 Unit	0	0	438 Unit	438 Unit		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Jumlah perlengkapan jalan terpasang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat permberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat	605 Perlengkapan jalan	745 Perlengkapan Jalan	0	0	0	605 Perlengkapan jalan	745 Perlengkapan Jalan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	271 Unit	1120 Unit	1120 Unit	0	0	271 Unit	1120 Unit		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di badan jalan dan di luar badan jalan (fasilitas parkir on street dan off street, halte, shelter dll) yang di perbaiki	1 Paket	1 Fasilitas	0	0	0	1 Paket	1 Fasilitas	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	1 Unit	1 Unit		0	0	100 %	100 %	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	0	0	1120 Unit	0	0	0	0		0	0	0	0	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C	0	62,53%	0	0	70,86%	0	62,53%	0	0		0	100%	0	0	
	Persentase terminal tipe C berkondisi baik	0	0	63.92%	67,30%	0	0	0	63.92%	67,30%		0	0	100 %	100 %	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	0	1 Unit	0		100 %	0	100 %	0	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas utama dan pendukung terminal tipe C yang diperbaiki	0	3 Fasilitas	0	0	0	0	3 Fasilitas	0	0		0	100%	0	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0	2 Unit	0	0	0	0	2 Unit	0		0	0	100 %	0	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	0	0	0	2 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen		0	0	0	100 %	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	0	0	0	2 Unit	2 Unit	0	0	0	2 Unit		0	0	0	100 %	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	0	0	0	100%	100%	0	0	0	100%		0	0	0	100 %	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	6 Dokumen	6 Dokumen		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	1 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala	100%	40.1%	100%	100%	100%	100%	40.1%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	0	16307 Unit	16307 Unit	0	0	0	16307 Unit	16307 Unit		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan bukti lulus uji	0	30000 Buah	0	0	0	0	30000 Buah	0	0		0	100%	0	0	
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen	0	0	30000 Dokumen	30000 Dokumen		0	0	100 %	100 %	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	1 Laporan		100 %	0	0	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	0	29 Alat Uji	0	0	0	0	29 Alat Uji	0	00		0	100%	0	0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	0	0	29 Unit	29 Unit	29 Unit	0	0	29 Unit	29 Unit		0	0	100 %	100 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Uji emisi dan Uji Petik Pelayanan Uji kendaraan Bermotor	44 Layanan	0	0	0	0	44 Layanan	0	0	0		100 %	0	0	0	
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	3 Laporan	0	0	0	0		0	0	0	0	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah lokasi uji petik dan uji emisi kendaraan bermotor	25 Alat	70 Lokasi	0	0	0	25 Alat	70 Lokasi	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	0	0	70 Laporan	70 Laporan		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan)	0	94%	0	0	0	0	94%	0	0		0	100%	0	0	
	Rata-rata Kecepatan perjalanan di jalan kabupaten bandung	0	0	95%	96%	97%	0	0	95%	96%		0	0	100 %	100 %	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	31 Lokasi	0	3 Laporan	0	3 Laporan	31 Lokasi	0	3 Laporan	0		100 %	0	100 %	0	
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	0	16 Kegiatan	0	0	0	0	16 Kegiatan	0	0		0	100%	0	0	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	16 Dokumen	0	0	0	0	16 Dokumen	0		0	0	100 %	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	2 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	0	4 Laporan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	0		100 %	100%	0	0	
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	15 Dokumen	16 Dokumen	0	0	0	15 Dokumen		0	0	0	100 %	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	271 Unit	0	0	0	0	271 Unit	0		0	0	100 %	0	
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	0	0	0	4 Laporan	2 Dokumen	0	0	0	4 Laporan		0	0	0	100 %	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan survei lalu lintas dan jumlah kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas	0	3 Kegiatan	0	0	0	0	3 Kegiatan	0	0		0	100%	0	0	
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	0	0	0	3 Laporan		0	0	0	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui	0	100%	0	0	0	0	100%	0	0		0	100%	0	0	
	Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui	0	0	100%	100%	100%	0	0	100%	100%		0	0	100 %	100 %	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalaln yang dibahas	24 Dokumen	13 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	13 Dokumen	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	13 Laporan	100%	13 Laporan	0	0	13 Laporan	100%		0	0	100 %	100 %	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pelaksanaan pengawasan rekomendasi andalalin	22 Lokasi	6 Lokasi	0	0	0	22 Lokasi	6 Lokasi	0	0		100 %	100%	0	0	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	0	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0	0	6 Laporan	6 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tercapainya persentase sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0		100 %	100%	0	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase Peningkatan Laporan Inspeksi/ audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan Kompetensi Pengemudi sesuai aturan	0	0	100%	100%	0	0	0	100%	100%		0	0	100 %	100 %	
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Inspeksi Keselamatan Sarana Transportasi (Rampcheck)	20 Kali	0	0	0	0	20 Kali	0	0	0		100 %	0	0	0	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor umum diinspeksi	2 Kegiatan	420 Pengemudi	0	0	0	2 Kegiatan	420 Pengemudi	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	11 Laporan	11 Laporan	0	0	0	11 Laporan	11 Laporan		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	0	3 Laporan	0	0	0	0		0	0	0	0	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang	0	46%	0	0	49%	0	46%	0	0		0	100%	0	0	
	Persentase Angkutan umum yang Layak dan memenuhi kompetensi	0	0	47%	48%	0	0	0	47%	48%		0	0	100 %	100 %	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang yang tersedia	6 Kegiatan	2527 kendaraan	0	0	0	6 Kegiatan	2527 kendaraan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	2527 Unit	2527 Unit	2527 Unit	0	0	2527 Unit	2527 Unit		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan angkutan umum orang dan barang yang diawasi	33 Lokasi	44 Perusahaan	0	0	0	33 Lokasi	44 Perusahaan	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	0	0	44 Laporan	44 Laporan		0	0	100 %	100 %	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi regulator	0	66.25%	66.5%	0	0	0	66.25%	66.5%			00	100%	100 %	0	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Implementasi Rencana Kerja Trayek	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0		100 %	0	0	0	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek perkotaan yang dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0		0	0	100 %	0	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%		100 %	0	100 %	100 %	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	0	12 Laporan	12 Unit	12 Unit	0	0	12 Laporan	12 Unit		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Terintegrasi Secara Elektronik															
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	50%	50%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%		100 %	100%	100 %	100 %	
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan	50%	50%	100%	100%	100%	50%	50%		100%		100 %	100%	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah permohonan pemenuhan persyaratan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Pemohon	0	0	0	2 Kegiatan	2 Pemohon	0	0		100 %	100%	0	0	
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen		0	0	100 %	100 %	

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	0	25%	0	0	0	0	25%	0	0		0	100%	0	0	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan	0	50%	0	85%	90%	0	50%	0	85%		0	100%	0	100 %	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian yang disusun	0	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0		0	100%	0	0	
Pengendalian PelaksanaaRencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	0	00	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1 laporan	1 Laporan		0	0	100 %	100 %	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Kelompok sasaran layanan Dishub sangat luas dan beragam, mencakup semua pihak yang terkait dengan kegiatan perhubungan. Dishub berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh kelompok sasaran tersebut guna mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung meliputi seluruh masyarakat yang menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perhubungan. Ini termasuk pengguna jalan, penumpang kendaraan umum dan pengusaha transportasi serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan dan kegiatan perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung (Dishub) memiliki berbagai layanan yang ditujukan untuk berbagai kelompok sasaran. Secara umum, kelompok sasaran Dishub dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Pengguna Jalan:

Ini adalah kelompok terbesar yang dilayani oleh Dishub Kabupaten Bandung. Mereka mencakup semua orang yang menggunakan jalan, baik sebagai pengendara kendaraan bermotor (mobil, motor, dll.), pejalan kaki, pengguna sepeda, maupun pengguna transportasi publik. Layanan yang diberikan kepada kelompok ini meliputi pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti marka jalan, rambu lalu lintas, dan Penerangan Jalan Umum.

2. Penumpang Angkutan Umum:

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang menggunakan berbagai jenis angkutan umum, seperti bus, kereta api, dan angkot. Layanan yang diberikan meliputi perizinan trayek, pengaturan jadwal, pengawasan kelaikan kendaraan dan fasilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan.

3. Pengusaha Transportasi:

Kelompok ini meliputi perusahaan otobus dan penyedia jasa transportasi lainnya. Dishub memberikan layanan perizinan, pengawasan operasional, serta fasilitasi pengembangan usaha.

4. Masyarakat Terdampak Kebijakan dan Kegiatan Perhubungan:

Kelompok ini mencakup masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan dan kegiatan Dishub Kabupaten Bandung, seperti pembangunan jalan, pengaturan parkir, dan kebijakan transportasi lainnya. Dishub Kabupaten Bandung memberikan layanan informasi, konsultasi, serta upaya mitigasi dampak negatif.

Layanan Dishub Kabupaten Bandung yang Ditujukan untuk Kelompok Sasaran Tertentu:

1. Uji KIR (Kendaraan):

Layanan ini ditujukan untuk pemilik kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan mereka laik jalan dan memenuhi standar keselamatan.

2. Izin Trayek Angkutan Umum:

Layanan ini ditujukan untuk perusahaan transportasi yang ingin mengoperasikan angkutan umum di suatu rute tertentu.

3. Pemasangan Rambu Lalu Lintas:

Layanan ini ditujukan untuk pengguna jalan untuk memberikan informasi dan petunjuk terkait lalu lintas.

4. Pengaturan Parkir:

Layanan ini ditujukan untuk pengguna jalan dan pemilik lahan parkir untuk mengatur penggunaan ruang parkir. Adapun kedepannya akan menggunakan sistem Parkir berlangganan.

5. Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum.

Layanan ini ditujukan untuk pengguna jalan untuk memberikan penerangan jalan umum guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dimalam hari. Adapun pemenuhan layanannya akan menggunakan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra pelayanan Dishub Kabupaten Bandung adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dishub dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan daerah. Mitra pelayanan ini terbagi kedalam beberapa kategori diantaranya:

a. Bidang Perencana Pada Dishub;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Legislatif) sebagai mitra dalam pembahasan dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memberikan aspirasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan;

c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
d. Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai mitra yang terlibat langsung dalam perencanaan partisipatif dan menyampaikan kebutuhan masyarakat;
e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi daerah melalui investasi dan kemitraan publik-swasta;
f. Akademisi dan Peneliti sebagai mitra dalam menyediakan riset dan kajian ilmiah, data dan analisis sebagai dasar perencanaan;
g. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah (NGO) berperan dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi independen;
h. Masyrakat dan Kelompok Komunitas; berperan dalam sumber aspirasi dan partisipasi dalam penyusunan prioritas pembangunan serta terlinat dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang, Konsultasi Publik, dan survei kepuasan layanan.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Tahap pertama merupakan perkuatan fondasi transformasi.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial untuk

menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Hal ini dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional. Dalam hal ini Dishub Kabupaten Bandung sebagai salah satu perangkat daerah dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan menyelaraskan arah, kebijakan serta pemetaan program kegiatan yang mendukung dalam terwujudnya Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

1. Aksesibilitas
   a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
   b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.
   c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai.
   d. Terdapat beberapa PRN/PRW/RSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur kereta api.
2. Kinerja Pelayanan
   a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online.
   b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemadu yang diharapkan melalui subsektor.
   c. Belum optimalnya peran angkutan laut dikarenakan adanya ketimpangan muatan.
   d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan.
   e. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.
   f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandara khususnya dalam mendukung pemberian alokasi waktu terbang (*slot time*).
   g. Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali terbentur permasalahan kepemilikan lahan.

h. Sebagian bandar udara mengalami overcapacity sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran.
i. Faktor utama kenaikan tarif tiket pesawat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen utama antara lain harga avtur, nilai tukar rupiah dan komponen biaya lainnya (pajak, sparepart, sewa pesawat, dll).

3. Keselamatan dan Keamanan
   a. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi
   b. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
   c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi.
   d. Kurangnya tenaga berlisensi di bandar udara terutama keamanan penerbangan dan PKP-PK.
   e. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Restrukturisasi dan Reformasi
   a. Permasalahan Kelembagaan (Institusi Penyelenggara Perkeretaapian).
   b. Lembaga pelatihan penerbangan secara jumlah sudah sangat memadai namun daya serap pada industri penerbangan masih terkendala dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan maskapai penerbangan.
   c. Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan.
5. Teknologi
   a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi.
   b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internai serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal.

c. Belum terpenuhinya target jumlah dan kompetensi penditi, dimana penditi merupakan modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi.
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan.
e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

B. Telaahan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat

Beberapa isu yang relevan dalam bidang transportasi yang hingga saat ini masih terus menjadi perhatian utama dalam Renstra dinas perhubungan provinsi adalah:

a. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport.*
b. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.
c. Persentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentase;
d. Jumlah kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil yang meningkat antara lain dikarenakan adanya kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor yaitu melalui kemudahan dalam proses pembelian kendaraan bermotor secara kredit dan kondisi angkutan umum saat ini yang belum memadai;
e. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional;
f. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi;
g. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang;
h. Pemisahan regulator dan operator pada transportasi udara masih belum sempurna karena adanya tumpeng tindih kewenangan antara unit-unit organisasi;
i. Mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandar udara di Jawa Barat sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional, berdasarkan hirarki fungsi secara efisien

dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara di Jawa Barat;

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029

Berdasarkan hasil telaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, terdapat Prioritas Pembangunan, Penetapan indikator, target, dan pagu indikatif Program serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan, telaahan sebagai berikut, Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, visi Kabupaten Bandung adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dengan lima misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mendukung capaian misi ke empat yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi", dengan tujuan "Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan" dan sasaran 4.1 yaitu "Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur dasar yang inklusif " di turunkan jadi Tujuan dinas perhubungan yaitu "Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau" dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi, dan sasaran dinas perhubungan yaitu "Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan umum melalui penyediaan transportasi yang berkualitas, didukung dengan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang berkeselamatan" dengan Indikator sasarannya adalah Persentase perjalanan

menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung dan Rasio ketersediaan prasarana perhubungan.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan,

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044, transportasi ditempatkan sebagai salah satu aspek penting dalam penataan ruang wilayah. Pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan kebijakan untuk melakukan pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung fungsi pusat kegiatan dan mengurangi permasalahan transportasi yang sering terjadi di kawasan metropolitan Bandung Raya. Strategi ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (3), yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan angkutan massal skala regional, pembangunan kawasan berorientasi transit, serta peningkatan kapasitas pelayanan lalu lintas pada jalan umum Lebih lanjut,

Strategi pengembangan transportasi dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (3) yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan, pengembangan sistem angkutan massal skala regional, serta pembangunan kawasan berorientasi transit yang mengutamakan konektivitas antar moda. Strategi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan lalu lintas pada jalan umum, sehingga kemacetan di kawasan strategis dapat ditekan dan efisiensi pergerakan dapat tercapai. Dengan pengaturan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal tersebut, pengembangan transportasi di Kabupaten Bandung diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, modern, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pergeseran penggunaan moda transportasi pribadi menuju angkutan umum massal, mengurangi beban lalu lintas di jalur utama, serta memperkuat keterhubungan Kabupaten Bandung dengan wilayah sekitarnya maupun dengan jaringan transportasi regional dan nasional.

2.2.5 Telaahan Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK ssalah satunya adalah “Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan”. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan.

Analisis data Tahun 2024 (Laporan Umum Analisis indikator kinerja utama, Tim Studi PTDI STTD 2024), membagi wilayah Kabupaten Bandung menjadi 34 zona internal dan 7 zona eksternal

Tabel 2.6: Profil Perjalanan di Kab. Bandung

Zona Pergerakan	No	Total Bangkitan per Hari	
		Zona	Jumlah Perjalanan
Semua Zona	1	SOREANG	1.156.965
	2	MAJALAYA	874.018
	3	KATAPANG	292.608
	4	CANGKUANG	174.854
	5	KUTAWARINGIN, SOREANG	335.995
	6	MARGAASIH	231.807
	7	MARGAHAYU	273.490
	8	PAMEUNGPEUK	167.015
	9	BANJARAN	212.448
	10	CIMAUNG	122.901
	11	PANGALENGAN	209.107
	12	PASIR JAMBU	185.742
	13	CIWIDEY	197.202
	14	DAYEUHKOLOT	183.409
	15	BALEENDAH	305.098
	16	ARJASARI	122.886
	17	ARJASARI	93.679
	18	RANCABALI	148.016
	19	BOJONGSOANG	239.032
	20	BALEENDAH	258.270
	21	CIPARAY	277.182
	22	CIPARAY	364.205
	23	PACET	309.106
	24	KERTASARI	199.807
	25	CIMENYAN	226.857
	26	CILENGKRANG	150.781
	27	CILEUNYI	268.374
	28	RANCAEKEK	295.280
	29	SOLOKAN JERUK	192.008
	30	PASEH	158.154
	31	IBUN	153.077
	32	CICALENGKA	109.620
	33	CIKANCUNG	175.897
	34	NAGREG	272.931
	35	GARUT	120.960
	36	GARUT SELATAN	75.543
	37	CIANJUR	26.576
	38	BANDUNG BARAT	68.201
	39	CIMAHI	86.953
	40	KOTA BANDUNG	309.868
	41	SUMEDANG	223.511

Zona Pergerakan	No	Total Bangkitan per Hari	
		Zona	Jumlah Perjalanan
	TOTAL ZONA INTERNAL		8.986.146
	TOTAL ZONA EKSTERNAL		911.612
	TOAL WILAYAH KAJIAN		9.849.433

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2024.

Dari data tersebut (sebagaimana terinci dalam Tabel 2.6) dapat disimpulkan bahwa:

a. Untuk pergerakan internal, Kecamatan Soreang, Majalaya, Ciparay, Kutawaringin dan Nagreg memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan dalam wilayah lokal (jaringan jalan sekunder dan jaringan trayek lokal). Sementara Kecamatan Cilengkrang, Rancabali dan cimaung memiliki jumlah pergerakan internal-internal terendah.
b. Dari ke-34 zona yang dianalisa, 12 zona memiliki total perjalanan lebih besar dari rata-rata perjalanan zona se-Kabupaten Bandung (264.298).
c. Menyimpulkan poin a dan b di atas, bahwasanya wilayah Kabupaten Bandung sudah berada pada titik urgensi kebutuhan penyediaan jaringan prasarana jalan maupun sarana layanan angkutan yang memadai

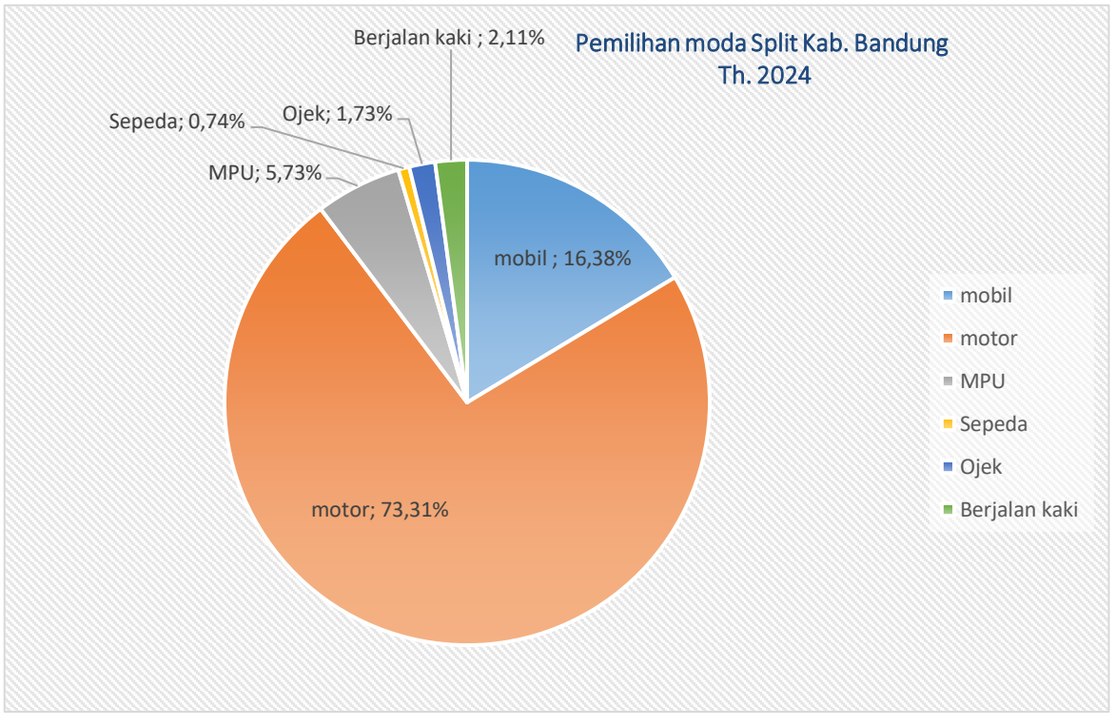
Komposisi pemilihan moda atau jenis kendaraan (*moda split*) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2024, sebagaimana gambaran realita yang terlihat sehari-hari bahwa pergerakan lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dengan urutan sebagai berikut:

a. Sepeda motor 73,31%.
b. Mobil 16,38%.
c. MPU 5.73%
d. Sepeda 0,74%.
e. Ojek 1.73%.
f. Berjalan Kaki 2.11%

Namun kembali lagi patut dipertimbangkan bahwa, seluruh pergerakan dengan moda apapun sejatinya pasti diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, pengembangan jaringan fasilitas pejalan kaki (*pedestrianization*) merupakan hal yang penting dan mendasar dalam *urban design*. Kebutuhan ini tentunya wajib ditangkap oleh *stakeholders* terkait, instansi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan trotoar.

Gambar 2.2

Moda Split di Kab. Bandung Tahun 2024



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2024.

Berbicara tentang angka ideal *moda split* sebagaimana telah direkam dalam PERDA Kab. Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, Pemerintah Daerah harus mengupayakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di daerah sebesar 60%. Melihat gambar di atas, disimpulkan bahwa di Tahun 2024, perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung baru sebesar 5.73%.Adapun maksud perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kab. Bandung didominasi oleh maksud untuk bekerja, belajar, belanja serta kegiatan sosial.

Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pada dasarnya pembangunan dan penataan kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan, namun dalam realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung masih menghadapi kendala dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat, serta menjadikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan optimal.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Aspek Angkutan	Belum Terintegrasinya Sistem layanan Transportasi	1. Layanan transportasi umum kurang efisien, rute terbatas dan kondisi kurang memadai
			2. Berkembangnya pusat pertumbuhan baru
			3. Masih rendahnya cakupan layanan angkutan masal, sehingga aksesibilitas dan konektivitas di wilayah kabupaten Bandung belum sepenuhnya bisa terlayani
2	Aspek Lalu Lintas	Kemacetan Di wilayah perkotaan	1. Ketidakseimbangan antara Pembangunan prasanana jalan dengan pertumbuhan kendaraan;
			2. Belum seluruhnya ruas jalan di Kabupaten bandung terpasang fasilitas perlengkapan jalan (Alat Penerangan Jalan, Rambu, Marka)
			3.Perilaku pengemudi yang sering melanggar norma peraturan lalu lintas;
			4. Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pejalan kaki.
3	Penegakan Hukum dan Pelanggaran Lalu Lintas	Belum Optimalnya Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Pelanggaran di sektor transportasi	1. Keterbatasan Sumber Daya dan Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum
4	Pelayanan Publik	Prasarana penunjang layanan publik sektor transportasi	1. Kurang memadainya Kondisi Prasana utama pendukung layanan antara lain terminal, pengujian berkala kendaraan bermotor, serta prasarana perparkir.

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

2.2.7 Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh Dishub Kab. Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan Dishub Kab. Bandung.

a. Pengetatan dalam pelaksanaan uji berkala laik jalan kendaraan bermotor.
b. Mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan angkutan umum sebagai moda transportasi.
c. Peningkatan dan Pengembangan Transportasi Publik Massal: Membangun dan memperluas jaringan transportasi umum yang efisien, terjangkau, dan nyaman untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
d. Manajemen Lalu Lintas dengan Sistem Lalu Lintas Cerdas (ITS): Menggunakan sensor dan data untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan aliran lalu lintas.
e. Perencanaan Tata kota yang berkelanjutan, Pengembangan Kota Berorientasi Transit Oriented Development (TOD): Membangun pusat-pusat kegiatan di sekitar simpul transportasi umum.
f. Edukasi dan Penegakan Hukum, Edukasi Berlalu Lintas: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan etika berkendara.
g. Penegakan Hukum yang Tegas: Terhadap pelanggaran lalu lintas dan parkir sembarangan.

2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan.
   a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving, penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau BRT, *transit oriented development* (TOD) dan *pedestrianization*.
   b. Subsidi untuk angkutan perintis.
   c. SAKIP.
3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat.

   Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari:
   - Monorail Metro Bandung;
   - Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon;
   - Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka;
   - Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka;
   - Pengembangan jalur kereta api khusus cargo;
   - Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey.

4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dishub Kab. Bandung.
   a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya.
   b. Pengembangan sistem angkutan umum massal.
   c. Pembangunan Jalan Tol Cigatas.
   d. Pengembangan AKAP dan AKDP.
   e. Pembangunan terminal penumpang.
   f. Pengembangan angkutan berbasis rel.
   g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung–Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek.
5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dishub Kab. Bandung.
   a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi.
   b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian (mata pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan kontribusi tertinggi tertinggi bagi PDRB).
   c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan Kota Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi antar kota.
   d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama.
6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung.
   a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana transportasi umum.
   b. *Road density* Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas wilayah terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km^2 atau setara dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). Dengan semakin bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, maka kebutuhan penambahan ruas jalan pun semakin meningkat.
   c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan *trip rate* >3.

d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menimbang bahwa, lalu lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu lintas menuju dan dari Kota Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun adalah ruas-ruas yang menghubungkan Kab. Bandung dengan Kota Bandung, yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi di sana adalah angkutan umum pada trayek AKDP.
e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan prasarana jalan sebagai berikut:
   1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan:
      - Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek.
      - Margaasih - Kutawaringin.
      - Cikancung - Cicalengka/Nagreg.
   2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan:
      - Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk.
      - Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari.
   3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat:
      - Pangalengan – Arjasari.
      - Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan pembukaan Tolgate di Gedebage/Tegalluar).
f. Di Tahun 2024, *moda share* angkutan umum dari total perjalanan hanya berkisar 5,73% sementara sepeda motor mendominasi hingga 73,31%.
g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, adalah perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, dengan kisaran *moda share* 65%.
h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan.
i. Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya dengan produk hukum yang mengikat.
j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor.
k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas manajemen rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus produk-produk unggulan, yang berkontribusi tinggi

terhadap PDRB Kab. Bandung (industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, pertanian).

l. Pengembangan simpul transportasi di Alamendah dan seputaran exit Tol Soroja.
m. Mendukung Misi Bupati dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, di sektor transportasi melalui pelaksanaan pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas harian dan hari-hari tertentu.
n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.
o. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi udara.
p. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan.
q. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan kompetensi teknis perhubungan.
r. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP.
s. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang perhubungan.

Ke-6 kelompok isu strategis tersebut di atas, kemudian akan dijadikan landasan dalam menetapkan fokus dan lokus program kegiatan, serta pentahapan pencapaian target kinerja.

Tabel 2.8 Isu Strategis Dishub

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya layanan pengujian kendaraan bermotor dan uji emisi gas buang yang dimiliki Dinas Perhubungan Kab Bandung	Polusi gas buang kendaraan Bermotor	Rendahnya kualitas udara akibat emisi Kendaraan, Kemacetan lalu lintas, kebutuhan akan transportasi publik yang lebih baik, serta dampak pembangunan infrastruktur transportasi terhadap lingkungan	Asap kendaraan bermotor merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca global dan polusi udara. Gas buang kendaraan, terutama karbon dioksida (CO_2), berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Polusi udara dari kendaraan juga berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan	Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi menjadi perhatian utama. Pemerintah dan industri berupaya mengurangi jejak karbon melalui elektrifikasi kendaraan, pengembangan bahan bakar alternatif, dan peningkatan efisiensi energi dalam transportasi.	Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi Emisi gas buang dari kendaraan bermotor tidak memenuhi standar ambang batas emisi gas buang	Pengetatan dalam pelaksanaan uji berkala laik jalan kendaraan bermotor. Mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan angkutan umum sebagai moda transportasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penyediaan infrastruktur transportasi (perlengkapan jalan) Ketersediaan transportasi publik *bus rapid transit* dan transportasi publik lainya Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan titik parkir Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perhubungan	Kemacetan Lalu Lintas Belum terintegrasinya sistem layanan transportasi di pusat kegiatan wilayah maupun lokal Belum optimalnya infrastruktur transportasi berkeselamatan Banyaknya lokasi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Minimnya prasarana pendukung pelayanan perhubungan			peningkatan jumlah kendaraan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, perilaku pengendara yang tidak tertib, dan perencanaan tata ruang kota yang kurang baik	peningkatan jumlah kendaraan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, perilaku pengendara yang tidak tertib, dan perencanaan tata ruang kota yang kurang baik	Peningkatan dan Pengembangan Transportasi Publik Massal: Membangun dan memperluas jaringan transportasi umum yang efisien, terjangkau, dan nyaman untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Manajemen Lalu Lintas dengan Sistem Lalu Lintas Cerdas (ITS): Menggunakan sensor dan data untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan aliran lalu lintas Perencanaan Tata Kota yang Berkelanjutan: - Pengembangan Kota Berorientasi Transit Oriented Development (TOD): Membangun pusat-pusat kegiatan di sekitar simpul transportasi umum. Edukasi dan Penegakan Hukum: - Edukasi Berlalu Lintas: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Edukasi dan Penegakan Hukum: - Edukasi Berlalu Lintas: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						lintas dan etika berkendara. Penegakan Hukum yang Tegas: Terhadap pelanggaran lalu lintas dan parkir sembarangan.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Renstra Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, melalui Renstra 2025 – 2029 ini Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi dan misi Bupati Bandung, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas untuk mencapai visi, misi, dan tujuan jangka menengah daerah dalam meningkatkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta mengukur kinerja organisasi melalui program dan kegiatan yang terukur selama periode 5 tahun. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau”.

3.1.2 Sasaran

Pencapaian Tujuan dari Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Dishub Kabupaten Bandung, untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan umum melalui penyediaan transportasi yang berkualitas, didukung dengan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang berkeselamatan dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung, ini didapatkan dari hasil pengukuran data moda share.

b. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan, ini didapatkan dari hasil penghitungan prasarana perhubungan yang telah tersedia.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur dasar yang inklusif	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi	19,14%	19,14%	21,74%	24,34%	26,94%	29,54%	indikator 1. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung, Indikator 2. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan IKIT= (0,6 x indikator1) + (0,4 x indikator 2) x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan umum melalui penyediaan transportasi yang berkualitas, didukung dengan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	5,73%	5,98%	6,23%	6,48%	6,73%	6,98%	Moda Share angkutan umum Kabuaten Bandung
			Rasio ketersediaan prasarana perhubungan	38,88%	38,88%	45,01%	51,13%	57,26%	63,39%	Jumlah ketersediaan prasarana perhubungan dibagi dengan kebutuhan ideal x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

3.2 Strategi Dishub dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishub Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Dishub Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel 3.2 merangkum strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Dishub Kabupaten Bandung guna mencapai visi dan misi Bupati terpilih dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung misi 4 yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Insfrastruktur yang Terintegrasi". Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah disajikan dalam Bab 2 serta dikaitkan dengan target-target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran perangkat daerag sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dishub Kabupaten Bandung selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dishub Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan umum melalui penyediaan transportasi yang berkualitas, didukung dengan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Pengembangan transportasi publik. 2. Peningkatan kapasitas jaringan dan simpul transportasi. 3. Manajemen kebutuhan transportasi. 4. Peningkatan keselamatan transportasi. 5. Manajemen regulasi, sumber daya, dan pembiayaan.

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

Berdasarkan strategi tersebut dibutuhkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga strategi menjadi lebih terfokus maka dibuat penahapan pembangunan Dishub Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas Dalam Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
Menyusun dan menyelaraskan kerangka kebijakan serta peta jalan (roadmap) pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kebijakan tingkat provinsi dan nasional.	Pengembangan infrastruktur pendukung dan integrasi moda transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi masyarakat.	Melakukan penguatan sistem tata kelola dan implementasi teknologi dalam mendukung operasional layanan transportasi publik yang lebih terpadu.	Optimalisasi sistem tata kelola dan implementasi teknologi dalam mendukung operasional layanan transportasi publik yang lebih terpadu.	Memantapkan model pengelolaan dan sustainability sistem transportasi publik massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.3 Penyajian Lokus Dinas Perhubungan

Lokus dalam rencana Strategis Dishub merujuk pada wilayah tertentu yang menjadi fokus utama intervensi program dan kegiatan selama periode perencanaan 2025-2029. Penetapan lokus bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan. Penetapan lokus akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, perencanaan kegiatan, serta penentuan prioritas pembangunan setiap tahun. Dengan adanya lokus yang jelas, intervensi diharapkan lebih terarah dan berdampak nyata pada pembangunan

Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi darat di Kabupaten Bandung sebagai upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib. Ruang lingkup program ini mencakup berbagai kegiatan yang saling mendukung dan saling berkaitan, antara lain:

a perencanaan pengembangan transportasi, serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas untuk seluruh masyarkat yang ada di Kabupaten Bandung
b Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, meliputi penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, cermin tikung, zebra cross, serta alat

pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan sarana lainnya, dilaksanakan untuk mendukung kelancaran dan keselamatan berlalu lintas di seluruh 31 kecamatan di Kabupaten Bandung

c Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan kelancaran arus kendaraan yang ada di Kabupaten Bandung,

d Penyediaan layanan angkutan umum yang memadai seperti penyedian Angkutan Perkotaan dan *Bus Rapid Transit* yang telah ada pada koridor Leuwi Panjang – Soreang, Leuwi Panjang – Majalaya dan BEC – Baleendah dan akan dikembangkan atau penambahan koridor diwilayah lain

e Pelayanan analisis dampak lalu lintas untuk mendukung perizinan pembangunan di Kabupaten Bandung

f Pengelolaan fasilitas parkir yang ada pada 99 ruas jalan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati,

g Pelayanan pengujian kendaraan bermotor guna memastikan kelayakan teknis kendaraan yang ada di Kecamatan Soreng, Kecamatan Baleendah dan 4 lokasi pengujian statis seperti di Kecamatan Majalaya, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Cicalengka dan di Mall Pelayanan Publik

h Pengelolaan terminal yang menjadi simpul transportasi yang ada di Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Soreang, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Cileunyi dan dua Terminal berstatus sewa di Kecamatan Dayeuh

Program Pengelolaan Perkeretaapian merupakan program yang bertujuan untuk menjamin keselamatan perlintasan kereta api di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan lokus Wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki perlintasan sebidang kereta api yaitu di Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Nagreg. Pada Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang pada ruas jalan Kabupaten dan Jalan Desa. pada ruas jalan Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perhubungan mengelola 3 perlintasan sebidang yaitu Perlintasan Sebidang Jl. Cibiru Hilir - Stasiun Cimekar (JPL Cimekar) yang berlokasi di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi, Jl. Bojongjati-Tanggeung (JPL Walini) yang berlokasi di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, dan Jalan Talun-Ciherang (JPL Jelegong) yang berlokasi di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek. Satu perlintasan sebidang pada ruas jalan Kabupaten Bandung belum ditingkatkan keselamatannya yaitu Jl. Nagrog-Srewen Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka, Kedepannya Perlintasan Sebidang ini akan

ditingkatkan keselamatannya dengan dibangun pos perlintasan sebidang dan pemasangan alat keselamatan perlintasan sebidang kereta api atas persetujuan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkerataapian.

Program pelayaran adalah suatu Program yang bertujuan mewujudkan penyediaan layanan transportasi berupa sarana dan prasarana angkutan penumpang umum yang beroperasi/melayani di sungai dan danau. Program ini mencakup penentuan rute, jadwal keberangkatan dan kedatangan, jenis kapal yang digunakan, muatan (barang atau penumpang, serta pendampingan teknis pengelolaan perizinan berusaha, Pada saat ini, Dinas Perhubungan melakukan intervensi pada kawasan wisata yang berlokasi di Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, serta Situ Cileunca, Kecamatan Pangalengan, diharapkan nantinya pelaksanaan program ini mampu memberikan intervensi terhadap layanan angkutan sungai di wilayah Kabupaten Bandung.

Tabel 3.4 Penyajian Lokus Dinas Perhubungan

Program	PAGU INDIKATIF					LOKUS
	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	67.063.711.864	46.761.472.600	50.523.034.600	50.611.472.600	50.596.472.600	31 Kecamatan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	489.000.000	534.000.000	514.000.000	514.000.000	514.000.000	Kecamatan cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, dan Nagreg
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	17.974.000	27.974.000	17.974.000	17.974.000	32.974.000	Situ cileunca Kecamatan Pangalengan dan situ patenggang Kecamatan Rancabali

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

3.4 Arah Kebijakan Dishub dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishub Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang disusun oleh Dishub Kabupaten Bandung guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishub selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029 harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. Berikut ini merupakan arah kebijakan Renstra Dishub Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan RPJMD:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Urusan Bidang Perhubungan	Peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk strategis	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk keselamatan, ketertiban, dan keandalan angkutan orang dan barang	
		Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah	Pengembangan dan optimalisasi Pengelolaan Retribusi sektor perhubungan	
		Pengembangan dan penerapan tata kelola konektivitas dan aksesibilitas masyarakat serta peningkatan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Restrukturisasi layanan dan jaringan angkutan umum untuk memperluas konektvitas dan aksesibilitas antar wilayah guna mendorong peningkatan perjalanan masyarakat dengan menggunakan moda angkutan umum	
		Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi	Mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik dan Optimalisasi layanan pengujian berkala kendaraan bermotor.	
		Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Metropolitan Bandung Raya	Pembangunan dan Pengembangan sarana, prasarana transportasi perkotaan yang terintergrasi dengan sistem transportasi Metropolitasn Bandung Raya	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

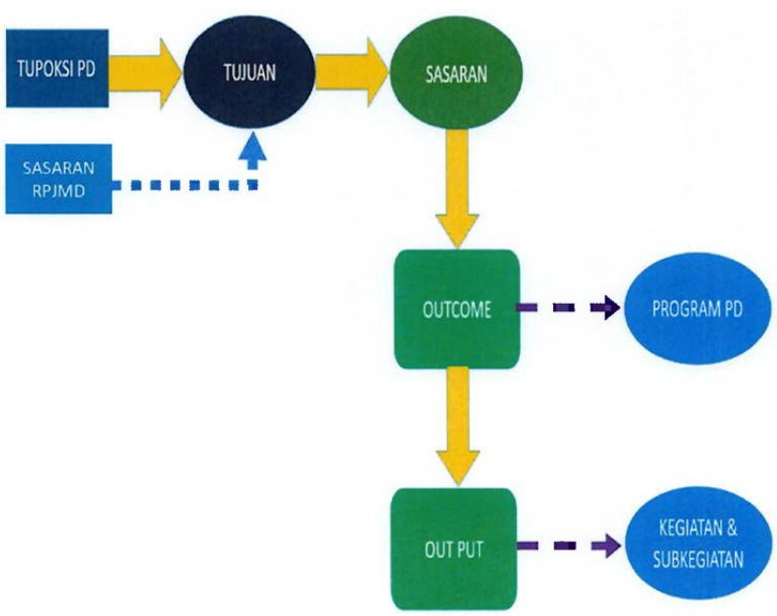
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dishub yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dishub yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Kebijakan dan strategi arah kebijakan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Dishub Kabupaten Bandung. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dishub Kabupaten Bandung. Keterkaitan antara program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra dengan dokumen RPJMD disajikan pada diagramdi bawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan

Program/Kegiatan/SubkegiatanRenstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri 2 Tahun 2025

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk periode 2025 – 2030, sebagai berikut:

TABEL 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Ketersediaan dan akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau				Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi		Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kelayakan, keterjangkauan, dan pemanfaatan infrastruktur transportasi publik di suatu wilayah, yang mencerminkan kemudahan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif. indikator 1. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung, Indikator 2. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan IKIT= (0,6 x indikator1) + (0,4 x indikator 2) x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan umum melalui penyediaan transportasi yang berkualitas, didukung dengan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang berkeselamatan			1. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung 2. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan		1. Moda Share Angkutan Umum 2. Jumlah ketersediaan prasarana perhubungan dibagi dengan kebutuhan ideal x 100%
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terpeliharanya BMD	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik dibagi jumlah total BMD dikali 100 %
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi	Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen naskah akademik (rancangan SK Parkir) dan SK parkir yang telah di tetapkan/ Kajian potensi optimalisasi pendapatan parkir x 100%
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH yang dibayarkan tepat waktu / Jumlah Laporan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		1. Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang dimanfaatkan 2. Peresentase Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi 3. Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal 4. Rasio Konektivitas Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi yang dibuat dibagi jumlah Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi yang dimanfaatkan x 100% 2. jumlah Layanan Perizinan sektor transportasi dibagi jumlah Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi 3.Jumlah Kelengkapan jalan yang telah terpasang dibagi jumlah kebutuhan ideal x 100% 4. Jumlah trayek yang beroperasi dibagi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							jumlah kebutuhan trayek x 100%
				1.Tersusunya Dokumen perencanaan dan Kebijakan 2. Tercapainya Sosialisasi edukasi keselamatan LLAJ 3. Panjang jalan yang diinspeksi	1. Jumlah dokumen perencanaan dan Kebijakan yang disusun 2.Jumlah Sosialisasi edukasi keselamatan LLAJ 3. Persentase panjang jalan yang diinspeksi	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen yang disusun 2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman keselamatan LLAJ
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas	Jumlah dokumen penetapan Rencana	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan	Jumlah dokumen penetapan Rencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				1. Terfasilitasinya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 2.Terfasilitasi pengawasan penyelenggaraan parkir	1. Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang terfasilitasi 2. Persentase pengawasan penyelenggaraan parkir yang terfasilitasi	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. (jumlah usulan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir/ Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang difasilitasi) x100% 2. (Jumlah perizinan perparkiran yang terawasi / Jumlah izin penyelenggaraan parkir

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							yang diterbitkan) x 100%
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
				1. Termitigasinya ruas jalan terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 2. Tersedianya	1. Presentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. jumlah ruas jalan yang termitigasi/jumlah ruas jalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik 3.Terlaksananya forum LLAJ	kecelakaan 2. Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik 3. Jumlah pelaksanaan forum LLAJ		2.jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/jumlah perlengkapan jalan ideal 3. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk forum LLAJ
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
				1. Terfasilitasinya sinkronisasi dan koordinasi dokumen Andalalin 2. Terlaksananya pengawasan rekomendasi persetujuan teknis andalalin	1. Persentase dokumen hasil andalalin terfasilitasi 2. Persentase pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andalalin	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. '(Jumlah dokumen andalalin yang disusun/Jumlah dokumen andalalin yang dibahas dan disetujui) x 100% 2. '(Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin/Jumlah Persetujuan Teknis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Andalalin yang diterbitkan) x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi
				Terlaksanya inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah kegiatan inspeksi keselamatan sarana transportasi	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan inspeksi keselamatan yang dilaksanakan
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				1. Terlaksananya penyediaan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	1.Persentase penyediaan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	1. Jumlah kegiatan pengawasan terhadap jumlah armada yang beroperasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				2. Terlaksanya pengendalian dan pengawasan angkutan umum yang beroperasi	2. Tingkat operasional angkutan umum/ Rasio operasional angkutan umum	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Kendaraan yang beroperasi dibagi kuota
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
				Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian yang ditetapkan terhadap kebutuhan kajian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Kartu Pengawasan penyelenggaraan angkutan umum yang diterbitkan/Jumlah Pengajuan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan umum) x100%
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
				Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C	Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	(Jumlah terminal tipe C berkondisi baik / Jumlah terminal tipe C) x 100%
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
				Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara
				Terlaksananya Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				1. Satuan ruang parkir berfungsi baik 2.Terpasangnya alat penerangan jalan (APJ) 3. Tersedianya alat penerangan jalan (APJ) dalam kondisi baik	1.Persentase Satuan ruang parkir yang berfungi baik 2. Persentase alat penerangan jalan (APJ) terpasang 3.Persentase alat penerangan jalan (APJ) terpasang dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. jumlah perlengkapan jalan pada satuan ruang parkir yang berfungsi baik/perlengkapan jalan yang terpasang pada setiap satuan ruang parkir 2. Jumlah APJ terpasang/APJ ideal 3. APJ dalam kondisi baik/APJ terpasang
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya operasional pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. (Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala/ Jumlah kendaraan bermotor wajib uji) x 100%
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Berkala Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api		Cakupan Perlintasan Keretaapi yang Ditangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah perlintasan sebidang yang tertangani dibagi total lintasan sebidang kewenangan kabupaten
				1. Terlaksananya penanganan Perlintasan Kereta api 2. Tersedianya peralatan keselamatan perlintasan sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota	1. Persentase Cakupan Perlintasan Keretaapi yang Ditangani 2. Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1. Jumlah perlintasan sebidang yang tertangani dibagi total lintasan sebidang kewenangan kabupaten 2. Jumlah Penyediaan dibagi total kebutuhan peralatan keselamatan perlintasan
				Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
				Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan danau		Persentase pendampingan teknis layanan angkutan sungai dan danau terfasilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	(Jumlah kegiatan pendampingan/ Jumlah Pengajuan pendampingan teknis terkait proses perizinan angkutan sungai dan danau) x100%
				Terlaksananya Sosialisasi/ Pendampingan teknis terkait proses perizinan angkutan sungai dan danau	Jumlah Sosialisasi/ Pendampingan teknis terkait proses perizinan angkutan sungai dan danau	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atau badan usaha terhadap prosedur perizinan
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber: Hasil Analisa Dinas Perhubungan Kab. Bandung 2025

Untuk rincian program, kegiatan dan subkegiatan serta skema pendanaan Dishub Kabupaten Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dishub Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN	Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi	% (Persen)		19.14%	109.675.906.056	21.74%	89.040.878.600	24.34%	93.040.878.600	26.94%	93.040.878.600	29.54%	93.040.878.600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	74,26	74,36	42.105.220.192	74,41	41.717.432.000	74,46	41.985.870.000	74,51	41.897.432.000	74,56	41.897.432.000	S.4.1
	2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		51,6	52,1		52,35		52,6		52,85		53,1		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	poin	81,75	82	142.876.000	82,25	157.876.000	82,50	157.876.000	82,75	157.876.000	83,00	157.876.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	6	42.876.000,00	6	57.876.000,00	6	57.876.000,00	6	57.876.000,00	6	57.876.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	% (Persen)	100	100	26.732.511.000	100	26.727.511.000	100	26.592.762.808	100	26.592.762.808	100	26.592.762.808	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	148 Orang /bulan	166	26.707.511.000,00	166	26.702.511.000,00	166	26.567.762.808,00	166	26.567.762.808,00	166	26.567.762.808,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	% (Persen)	> 80	100	70.000.000	100	90.000.000	100	170.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50 Paket	1	40.000.000	3	40.000.000,00	2	90.000.000,00	2	40.000.000,00	4	40.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	148 Orang	148	30.000.000	200	50.000.000,00	160	80.000.000,00	160	80.000.000,00	160	80.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran	% (Persen)	100	100	752.257.000	100	802.257.000	100	890.695.000	100	882.257.000	100	882.257.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15 Paket	1	20.000.000	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15 Paket	1	50.000.000	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	482.257.000	6	482.257.000,00	6	482.257.000,00	6	482.257.000,00	6	482.257.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75 Laporan	90	200.000.000	90	250.000.000,00	90	288.438.000,00	90	280.000.000,00	90	280.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	% (Persen)	100	100	1.045.440.000	100	284.440.000	100	445.440.000	100	310.000.000	100	310.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2	1.035.440.000,00	3	235.440.000,00	2	435.440.000,00	2	235.440.000,00	2	235.440.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2 Unit	50	10.000.000,00	50	49.000.000,00	50	10.000.000,00	50	74.560.000,00	50	74.560.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100	100	12.618.428.000	100	12.618.428.000	100	12.618.428.000	100	12.618.428.000	100	12.668.428.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	351.548.000	25	351.548.000	25	351.548.000	25	351.548.000	25	401.548.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12.266.880.000	12	12.266.880.000	12	12.266.880.000	12	12.266.880.000	12	12.266.880.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	% (Persen)	99,08	99,18	543.960.000	99,23	837.171.808	99,28	910.920.000	99,33	1.016.360.000	99,38	966.360.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	41 Unit		0		0		0		0		0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		33	331.560.000,00	36	501.960.000,00	36	501.960.000,00	36	501.960.000,00	36	501.960.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	82.400.000,00	5	84.400.000,00	5	84.400.000,00	5	84.400.000,00	5	84.400.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	130.000.000,00	2	250.811.808,00	2	324.560.000,00	2	430.000.000,00	2	380.000.000,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi	% (Persen)	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	% (Persen)	100	100	139.748.192	100	139.748.192	100	139.748.192	100	139.748.192	100	139.748.192	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2	139.748.192,00	2	139.748.192,00	2	139.748.192,00	2	139.748.192,00	2	139.748.192,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang dimanfaatkan	% (Persen)		100	67.063.711.864	100	46.761.472.600	100	50.523.034.600	100	50.611.472.600	100	50.596.472.600	S.4.1
	2. Peresentase Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi			100		100		100		100		100		
	3. Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal			52,31		54,96		58,02		61,08		64,13		
	4. Rasio Konektivitas Darat			49,52		49,77		50,02		50,27		50,52		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen perencanaan dan Kebijakan yang disusun	dokumen		5	1.328.216.000	4	929.216.000	4	659.216.000	4	1.233.216.000	4	718.216.000	
	2.Jumlah Sosialisasi edukasi keselamatan LLAJ	dokumen		1		1		1		1		1		
	3. Persentase panjang jalan yang diinspeksi	% (Persen)		20%		34%		45%		62%		76%		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	250.000.000,00	1	175.000.000,00	1	5.000.000,00	1	605.000.000,00	1	5.000.000,00	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		2	249.216.000,00	2	249.216.000,00	2	249.216.000,00	2	249.216.000,00	1	249.216.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		2	500.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	90.000.000,00	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	5.000.000,00	1	100.000.000,00		0		0		0	
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		1	174.000.000,00	1	200.000.000,00	1	180.000.000,00	1	174.000.000,00	1	174.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang terfasilitasi	%	100%	14	30.000.000	17	75.000.000	20	60.000.000	23	60.000.000	26	60.000.000	
	2. Persentase pengawasan penyelenggaraan parkir yang terfasilitasi			16		18		20		22		24		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	6 Dokumen	6	10.000.000	6	35.000.000,00	7	25.000.000,00	8	25.000.000,00	9	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1 laporan	8	20.000.000	8	40.000.000,00	9	35.000.000,00	10	35.000.000,00	11	35.000.000,00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Presentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	% (Persen)		15	7.908.543.400	18	1.684.715.000	20	1.811.604.000	22	1.657.204.000	25	1.801.939.000	
	2. Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	% (Persen)		20		25		35		50		70		
	3. Jumlah pelaksanaan forum LLAJ	Dokumen		4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	1.637.929.500,00	2	868.194.000,00	2	918.194.000,00	2	918.194.000,00	2	962.929.000,00	
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0			0		0		0		0		0	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	4	4	15.600.000,00	4	25.000.000,00	4	20.000.000,00	4	15.600.000,00	4	15.600.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	2	2	6.131.603.900,00	5	668.111.000,00	7	600.000.000,00	7	600.000.000,00	8	700.000.000,00	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	3	3	123.410.000,00	4	123.410.000,00	4	273.410.000,00	4	123.410.000,00	4	123.410.000,00	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	1. Persentase dokumen hasil andalalin terfasilitasi	% (Persen)	100	15	84.590.000	18	124.590.000	20	114.590.000	23	114.590.000	25	114.590.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2. Persentase pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andalalin			17		19		20		21		22		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	13 Laporan	6	21.730.000	7	41.730.000,00	8	36.730.000,00	9	36.730.000,00	10	36.730.000,00	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	laporan	6 Laporan	50	62.860.000	55	82.860.000,00	58	77.860.000,00	62	77.860.000,00	65	77.860.000,00	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan inspeksi keselamatan sarana transportasi	kegiatan	100%	51	50.727.000	51	50.727.000	51	65.000.000	51	50.727.000	51	50.727.000	
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1	1	21.727.000,00	1	21.727.000,00	1	30.000.000,00	1	21.727.000,00	1	21.727.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	1	29.000.000,00	1	29.000.000	1	35.000.000,00	1	29.000.000,00	1	29.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase penyediaan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	% (Persen)		100	11.461.169.864	100	8.370.043.000	100	12.370.043.000	100	12.370.043.000	100	12.370.043.000	
	2. Tingkat operasional angkutan umum/ Rasio operasional angkutan umum			24		24		96		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	44 Laporan	3	1.550.000.000,00	3	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2527 Unit	2.033	9.911.169.864,00	2.033	8.320.043.000,00	1.932	12.320.043.000,00	1.830	12.320.043.000,00	1.830	12.320.043.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	% (Persen)	66,75 %			70	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	255.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				2	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	255.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	% (Persen)	100%	60%	50.000.000	65%	60.000.000	70%	50.000.000	75%	50.000.000	80%	50.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12 Unit	1.708	50.000.000	1.850	60.000.000,00	1.992	50.000.000	2.135	50.000.000	2.277	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C	% (Persen)	67,30 %	50	402.000.000	60	548.224.000	70	717.000.000	80	462.000.000	100	462.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen			0	2	100.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	1 Dokumen	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit			0			1	505.000.000,00					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2 Unit	3	382.000.000,00	3	423.224.000,00	3	182.000.000,00	3	432.000.000,00	3	432.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang			0	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.Persentase Satuan ruang parkir yang berfungi baik	% (Persen)		40%	44.765.901.600	45%	33.756.393.600	50%	33.463.017.600	55%	33.501.128.600	60%	33.556.393.600	
	2. Persentase alat penerangan jalan (APJ) terpasang			54,81		57,46		60,52		63,58		66,63		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	3.Persentase alat penerangan jalan (APJ) terpasang dalam kondisi baik			100		100		100		100		100		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	538 Unit	538	252.000.000,00	580	302.000.000,00	580	352.000.000,00	582	285.111.000,00	580	302.000.000,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1	36.624.000,00	350	75.000.000,00	350	36.624.000,00	350	36.624.000,00	350	75.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	271 Unit	1.500	11.416.509.600,00	1.500	1.529.393.600,00	1.500	1.529.393.600,00	1.500	1.529.393.600,00	1.500	1.529.393.600,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	5.000	33.060.768.000,00	5.000	31.850.000.000,00	5.000	31.545.000.000,00	5.000	31.650.000.000,00	5.000	31.650.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala	% (Persen)	100%	100	982.564.000	100	1.157.564.000	100	1.207.564.000	100	1.107.564.000	100	1.157.564.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0		0	6	205.000.000,00	11	255.000.000,00	8	155.000.000,00	8	205.000.000,00	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	30.000 Dokumen	35.000	600.000.000,00	35.000	600.000.000,00	35.000	600.000.000,00	35.000	600.000.000,00	35.000	600.000.000,00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	29 Alat Uji	29	294.334.000,00	29	294.334.000,00	29	294.334.000,00	29	294.334.000,00	29	294.334.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		3	30.000.000,00		0		0		0		0	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	70 Laporan	2	58.230.000,00	2	58.230.000,00	2	58.230.000,00	2	58.230.000,00	2	58.230.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Keretaapi yang Ditangani	% (Persen)		32,58	489.000.000	36,84	534.000.000	42,11	514.000.000	47,37	514.000.000	52,63	514.000.000	S.4.1
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1. Persentase Cakupan Perlintasan Keretaapi yang Ditangani	% (Persen)	85%	10%	489.000.000	15%	534.000.000	30%	514.000.000	50%	514.000.000	80%	514.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota			60%		65%		80%		80%		80%		
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	1	1	489.000.000,00	12	484.000.000,00	12	484.000.000,00	16	484.000.000,00	16	484.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Unit				3	50.000.000,00	3	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pendampingan teknis layanan angkutan sungai dan danau terfasilitasi	% (Persen)		100	17.974.000	100	27.974.000	100	17.974.000	100	17.974.000	100	32.974.000	S.4.1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Sosialisasi/ Pendampingan teknis terkait proses perizinan angkutan sungai dan danau	Dokumen	2	2	17.974.000	2	27.974.000	2	17.974.000	2	17.974.000	2	32.974.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	2	17.974.000,00	2	27.974.000,00	2	17.974.000,00	2	17.974.000,00	2	32.974.000,00	
TOTAL					109.675.906.056		89.040.878.600		93.040.878.600		93.040.878.600		93.040.878.600	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhungan 2025

Ket: S.4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029: Meningkatnya Ketersediaan dan akses Infrastruktur dasar serta inklusif

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dishub Kabupaten Bandung didorong oleh pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan cascading kinerja RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang dimanfaatkan 2. Peresentase Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi 3. Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal 4. Rasio Konektivitas Darat	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	R48
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	R48

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	R48
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	R48
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	R48

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	R48
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PN 5
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PN 5

Sumber: Data Pemetaan Rencana Aksi 2025-2029 Bapperida

Ket:

PN 5 = Sub kegiatan prioritas mendukung Astacita: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

R48 = Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Memperluas layanan Transportasi Publik/massal

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD

Indikator kinerja utama Dishub yaitu indikator tujuan perangkat daerah pada renstra, yang akan dicapai oleh Di Kabupaten Bandung dalam lima tahun mendatang yaitu untuk mendukung pencapaian misi ke-4

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu: “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi”,dengan tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Insfrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan” dan sasaran “Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Insfrastruktur Dasar Yang Insklusif”, dan indikator sasaran “Indeks Insfrastruktur”.

Secara umum, indikator kinerja utama Dishub Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi	%	19,14	19,14	21,74	24,34	26,94	29,54	indikator 1. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung, Indikator 2. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan IKIT= (0,6 x indikator1) + (0,4 x indikator 2) x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

Indikator kinerja kunci Dishub tahun 2025-2030 adalah indikator Tujuan Perangkat Daerah Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) yang terdapat dalam dokumen RPJMD yang menjadi

kewenangan Dishub Kabupaten Bandung dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi	%	19,14	19,14	21,74	24,34	26,94	29,54	indikator 1. Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung, Indikator 2. Rasio ketersediaan prasarana perhubungan IKIT= (0,6 x indikator1) + (0,4 x indikator 2) x 100%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mempercepat terwujudnya Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, yaitu “Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan”, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan konsep tematik pembangunan yang diwujudkan melalui model Gunungan (Kayon). Gunungan memiliki makna filosofis dan religius yang merepresentasikan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia di dalamnya. Sebagai simbol keseimbangan dan harmoni, Gunungan dijadikan kerangka konseptual dalam merancang arah pembangunan yang komprehensif, terpadu, serta berkesinambungan. Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep “gunungan” terdiri dari beberapa aksi tematik sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Kawasan Ekonomi Terpadu

c. Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
d. SDM Lebih Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Sejalan dengan pelaksanaan aksi tematik pembangunan tersebut, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung diharapkan memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Dinas Perhubungan, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, berperan strategis dalam mendukung penguatan empat fokus tematik, yaitu: peningkatan ketahanan pangan, pengembangan Kawasan ekonomi terpadu, pengembangan kawasan Ibu Kota Kabupaten Bandung, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dukungan pertama diwujudkan melalui tematik peningkatan ketahanan pangan, yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan kelancaran jaringan distribusi serta konektivitas wilayah. *Critical Success Factor* yang ingin dicapai adalah terciptanya keterjangkauan dan konektivitas yang mendukung kawasan produksi pangan. Dalam konteks tersebut, Dinas Perhubungan akan melaksanakan program berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, serta pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas guna menunjang kawasan produksi pangan.

Dukungan kedua diwujudkan dalam tematik pengembangan Kawasan ekonomi terpadu, yang diarahkan untuk menuntaskan permasalahan akses dan konektivitas kawasan pengembangan pariwisata. *Critical succes factor* atau tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung Kawasan pengembangan pariwisata. Program yang akan dilakukan oleh Dishub dalam konteks tersebut, melalui pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan dan penyediaan sarana transportasi publik yang berada pada Kawasan pariwisata.

Dukungan ketiga diwujudkan melalui tematik Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten, yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di titik-titik strategis serta perlambatan arus lalu lintas akibat parkir kendaraan di badan jalan. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi sistem transportasi, menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar, serta menata ruang parkir agar lebih tertib. Program yang

akan dilaksanakan meliputi integrasi layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* dengan moda angkutan lainnya, penyediaan perlengkapan jalan pendukung jaringan transportasi, penataan persimpangan lalu lintas seperti pada simpang Gandasari, simpang Gading tutuka, ruas jalan pasar sehat Soreang, dan kawasan *exit* tol Seroja serta optimalisasi pengerahan personel pengatur lalu lintas. Selain itu, dilakukan pula penataan kantong parkir di badan jalan, inovasi penyelenggaraan parkir berlangganan, pembuatan *park and ride* untuk mendukung angkutan masal dan pengakomodasian kebijakan pemberian jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor transportasi.

Dukungan keempat diwujudkan melalui tematik Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas, yang diarahkan untuk menurunkan permasalahan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bertujuan untuk mewujudkan *zero net emission* pada sektor transportasi. Program yang akan dilaksanakan oleh Dishub melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, meningkatkan penggunaan transportasi umum, menyelenggarakan kegiatan *Car Free Day*, serta melaksanakan program Pelajar Pelopor di lingkungan pendidikan sebagai sarana edukasi keselamatan berlalu lintas dan peningkatan kesadaran lingkungan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Tabel 4.6

Dukungan Dishub Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

No	Tema Pembangunan Tematik	Permasalahan	Program	Outcome	Indikasi Aktivitas
1	peningkatan ketahanan pangan	Kelancaran jaringan distribusi serta konektivitas wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1.pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik 2. Serta pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas guna menunjang kawasan produksi pangan

No	Tema Pembangunan Tematik	Permasalahan	Program	Outcome	Indikasi Aktivitas
2	Kawasan Ekonomi Terpadu	Belum optimalnya infrastruktur dan konektivitas yang mendukung kawasan pengembangan pariwisata			1. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan pariwisata 2. Penyediaan perlengkapan jalan pendukung keselamatan pada kawasan Pariwisata 3. Penyediaan sarana transportasi publik yang berada pada Kawasan pariwisata.
3	Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung	1. Kemacetan di titik-titik strategis 2. perlambatan arus lalu lintas akibat parkir kendaraan di badan jalan			1. Integrasi layanan Bus Rapid Transit (BRT) dengan moda angkutan lainnya 2. Penyediaan perlengkapan jalan pendukung jaringan transportasi 3. Penataan persimpangan lalu lintas seperti pada simpang Gandasari, simpang Gading tutuka, ruas jalan pasar sehat Soreang, dan kawasan exit tol Seroja 4. optimalisasi pengerahan personel pengatur lalu lintas 5. Inovasi penyelenggaraan parkir berlangganan dan pembuatan park and ride 6. Pengakomodasian kebijakan pemberian jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja

No	Tema Pembangunan Tematik	Permasalahan	Program	Outcome	Indikasi Aktivitas
					rentan di sektor transportasi.
4	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas	permasalahan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			1. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor 2. meningkatkan penggunaan transportasi umum 3. Mendukung kegiatan Car Free Day 4. melaksanakan program Pelajar Pelopor di lingkungan pendidikan sebagai sarana edukasi keselamatan berlalu lintas dan peningkatan kesadaran lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DishubKabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 harus dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman normatif sekaligus operasional bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan dalam menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata yang terukur dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya harus berprinsip pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan subkegiatan yang terncatum dalam dokumen Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Renstra yang disusun berdasarkan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based planning*) yaitu fokus pada hasil (*outcome)* dan

manfaat (*impact)* yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan target tahunan yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (Renja) sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis;

3. Pelaksanaan Renstra harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta transparan dalam proses penyusunan, implementasi dan pelaporan;
4. Sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi (Monev) harus dijalankan secara berkala dan sistematis. Setiap pemangku urusan wajib menyampaikan laporan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang kemudian akan dievaluasi untuk melihat efektivitas, kendala lapangan, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyesuaian strategi pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui mekanisme perencanaan tahunan dan perubahan Renstra bila diperlukan;
5. Pelaksanaan Renstra ini harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika ekonomi global, serta perkembangan teknologi informasi harus direspons secara cepat dan tepat oleh Dishub melalui kebijakan yang fleksibel namun tetap akuntabel;
6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur, pembenahan sistem birokrasi internal, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukungpelayanan publik harus terus ditingkatkan.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renstra Dishub Kabupaten Bandung diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar mendorong pencapaian hasil pembangunan yang nyata, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta perekonomian daerah secara luas.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam kaidah pelaksanaan Renstra disebutkan bahwa sistem pelaporan dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkala dan sistematis.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Proses ini harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan Pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan strategis dalam siklus manajemen pembangunan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dishub Kabupaten Bandung berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029. Pelaksanaan pengendalian mencakup monitoring (pemantauan), supervisi dan koordinasi antar pihak.

Fungsi pengendalian mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja, dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi internal secara periodik, supervisi lapangan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing urusan. Pengendalian juga diarahkan untuk mendeteksi lebih awal potensi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Bila diperlukan, tindakan korektif atau penyesuaian kebijakan dapat segera diambil, baik dalam bentuk rekomendasi perubahan strategi pelaksanaan, realokasi anggaran, maupun revisi terhadap target kinerja, peningkatan kapasitas kelembagaan serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, termasuk dampak nyata yang dihasilkan terhadap masyarakat. Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi triwulanan, tahunan, dan akhir periode Renstra. Proses ini mencakup evaluasi input, proses, output, dan outcome berdasarkan indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, baik dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan berikutnya. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik, DPRD, dan instansi pengawasan eksternal, serta sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan elektronik juga didorong agar proses evaluasi menjadi lebih cepat, akurat,

dan transparan. Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANDUNG

ttd

HILMAN KADAR

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1 Jumlah Pegawai Dishub Kabupaten Bandung 23

TABEL 2-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024 27

TABEL 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishub Kab. Bandung Berdasarkan Renstra 2020 – 2024 29

TABEL 2-4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kab. Bandung Periode Renstra 2021 – 2025 32

TABEL 2-5 Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Periode 2021-2025 50

TABEL 2-6 Profil Perjalanan di Kab. Bandung 83

TABEL 2-7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 87

TABEL 2-8 Isu Strategis Dishub 92

TABEL 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030 97

TABEL 3-2 Strategi dan Arah Kebijakan Dishub Tahun 2025-2029 99

TABEL 3-3 Pentahapan Pembangunan tahun 2025-2029 100

TABEL 3-4 Penyajian Lokus Dinas Perhubungan 102

TABEL 3-5 Arah Kebijakan Renstra Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 103

TABEL 4-1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatanRenstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 106

TABEL 4-2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dishub Tahun 2025-2030 129

TABEL 4-3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 157

TABEL 4-4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan 160

TABEL 4-5 Indikator Kinerja Kunci 161

TABEL 4-6 Dukungan Dishub Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029 163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	BSO Dishub Kab. Bandung	20
Gambar 2-2	*Moda Split* di Kab. Bandung Tahun 2024	86
Gambar 4-1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	104